



LKIP 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih.

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF SUMARY.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Sumber Daya	4
1.3 Sarana dan prasarana	7
1.4 Tugas dan Fungsi	19
1.5 Isu Strategis	19
1.6 Cascading Kinerja	20
1.7 Cascading Dinas P3APPKB	22
1.8 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 Rencana Strategis (Renstra) DP3APPKB Tahun 2021- 2026.....	25
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Instansi	29
3.2 Realisasi Anggaran dan Kinerja.....	47
3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi/Rekomendasi	57
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Rekomendasi Kebijakan.....	61

LAMPIRAN - LAMPIRAN

EXECUTIVE SUMMARY **(IKHTISAR EKSEKUTIF)**

A. Mekanisme Penyusunan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja tahun 2025 yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana.strategis

B. Mekanisme Pengukuran

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 telah menetapkan 6 (enam) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran. Ketujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 11 (sebelas) indikator kinerja.

Ringkasan prestasi capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	%
1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,96	74,6	91,02
2. Mengoptimalkan Kualitas Data pada DP3APKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ketersediaan Data Tingkat kab/kota	14	10	71,42
3. Meningkatnya pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	10	102,87
4. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	67,55	67,55	100
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	65%	90%	100
5. Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	64,36	62,72%	97,45 %
		2,24	2,28	99,11 %
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	BB	A	112,5

Ringkasan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah :

Ikhtisar pencapaian sasaran tahun 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang mendukung

kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan kebijakan strategis Pemerintah Pusat yaitu Pengarusutamaan Gender (pro-gender) dan Pencegahan Stunting dan perkawinan Usia Anak dengan pendekatan keluarga. Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan tengah didukung 10 (sepuluh) program yaitu :

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
7. Program Perlindungan Khusus Anak

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Program Pengendalian Penduduk (PP)
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pemanfaatan Laporan Kinerja untuk :

- Mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuh

BAB I

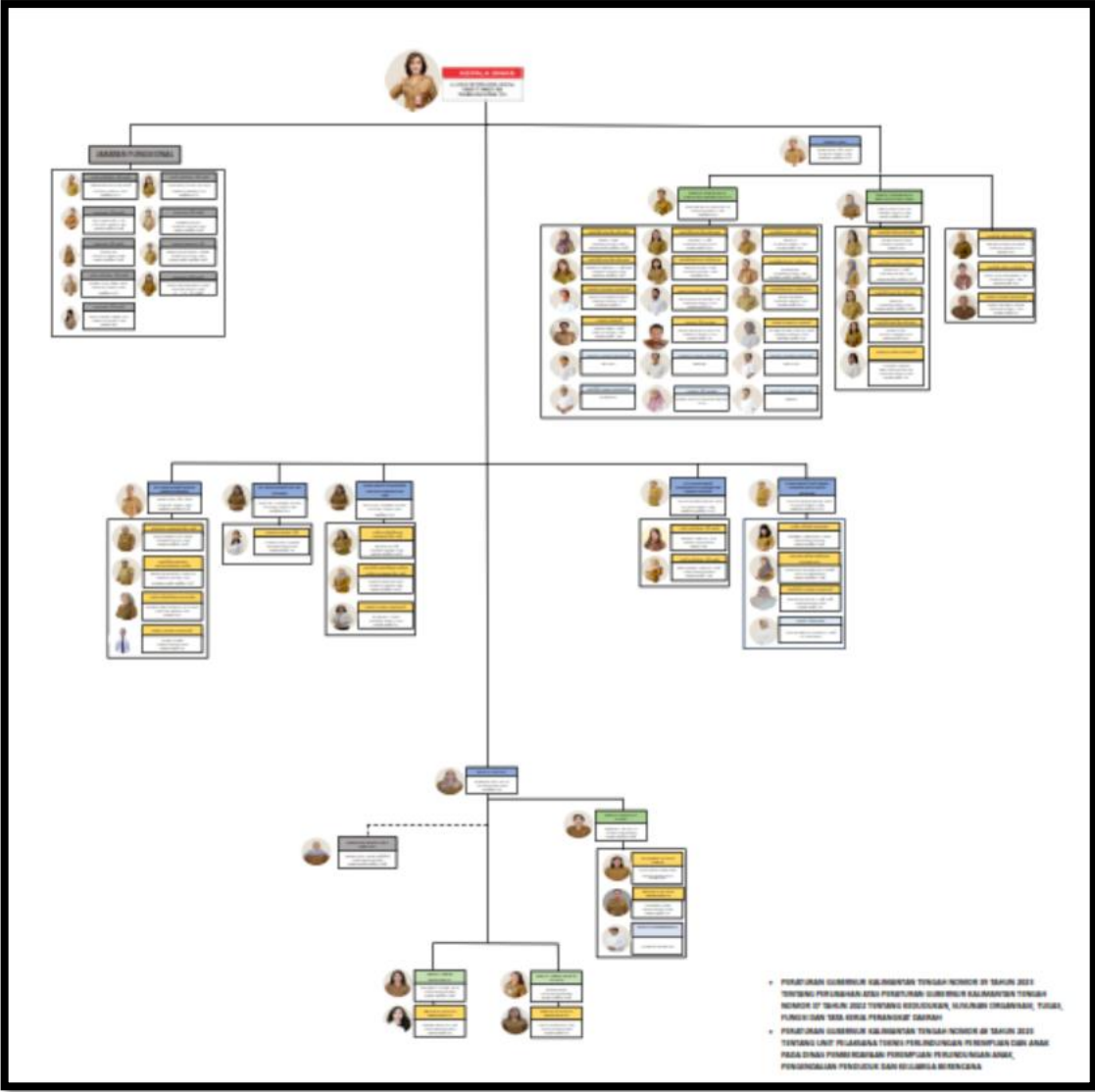
PENDAHULUAN

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk atas dasar Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2019, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
2. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;

Lokasi Kantor DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.11 Kota Palangka Raya. Dalam melaksanakan 2 urusan, DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dikepalai seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dan 5 (lima) Bidang yaitu : (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan ; (2) Bidang Data dan Informasi (3) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; (4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga ; (5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, serta Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak (UPT-PPA).



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP3APPKB, 2026

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Struktur Organisasi di atas, dapat digambarkan bahwa :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang, terdiri dari :
 - a) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
 - Koordinator Sub Subtansi Pelembagaan PUG
 - Koordinator Sub Subtansi Pemberdayaan Perempuan
 - Koordinator Sub Subtansi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.

b) Bidang Data dan Informasi, membawahi :

- Koordinator Sub Subtansi Data
- Koordinator Sub Subtansi Penyebarluasan Informasi
- Koordinator Sub Subtansi Partisipasi Masyarakat

c) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi :

- Koordinator Sub Subtansi Tumbuh Kembang Anak
- Koordinator Sub Subtansi Perlindungan Anak
- Koordinator Sub Subtansi Pemantapan Lembaga Layanan Anak

d) Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi :

- Koordinator Sub Subtansi Perlindungan Perempuan
- Koordinator Sub Subtansi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
- Koordinator Sub Subtansi Standarisasi Lembaga Layanan
- Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

e) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahi :

- Sub Koordinator Sub Subtansi Pengendalian Penduduk.
- Sub Koordinator Sub Subtansi Keluarga Sejahtera
- Sub Koordinator Sub Subtansi KB

f) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA)

- Kepala Seksi Tindak Lanjut
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kepala Seksi Pengaduan

g) kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

1.2 SUMBER DAYA

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai per desember 2025 disajikan terpilah laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

1) Jumlah ASN/Tenaga Kontrak

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	10	31	41
2.	Tenaga PPPK	11	12	23
3.	Tenaga Kontrak	1	0	1
Jumlah		22	43	65

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Januari 2026

Tabel 1.2.

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	3	6	9
2.	Golongan III	5	24	29
3.	Golongan II	2	1	3
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		10	31	41

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Januari 2026

2) Pendidikan PNS

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Jumlah		Total
		L	P	
1.	SDN			
2.	SLTP			
3.	SLTA	4	2	6
4.	D3	-	3	3
5.	S1	3	16	19
6.	S2	3	10	13
7.	S3			
Jumlah		10	31	41

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Januari 2026

3) Struktur eselon / jabatan fungsional

Tabel 1.4

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Eselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1	-	1	1
2.	Sekretaris / Kabid/Kepala UPT	Eselon III	7	1	2	3
3.	Kasubbag / Kasi	Eselon IV	5	1	4	5
4.	Fungsional Tertentu	-	46	2	8	10
Jumlah			59	4	15	19

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Januari 2026

Tabel 2.5

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama	IV/e	-	-	-	9
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	
3.	Pembina Utama Muda	IV / c	-	1	1	
4.	Pembina Tk. I	IV / b	1	-	1	
5.	Pembina	IV / a	2	5	7	29
6.	Penata Tk. I	III / d	1	12	13	
7.	Penata	III / c	-	6	6	

8.	Penata Muda Tk. I	III / b	1	3	4	
9.	Penata Muda	III / a	3	3	6	
10.	Pengatur Tk. I	II / d	-	1	1	3
11.	Pengatur	II / c	-	-	-	
12.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	2	-	2	
13.	Pengatur muda	II / a	-	-	-	
14.	Juru Tk. I	I / d	-	-	-	-
15.	Juru	I / c	-	-	-	
16.	Juru muda TK. I	I/b	-	-	-	-
17.	Juru Muda	I/a	-	-	-	-
JUMLAH			10	31	41	41

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Januari 2026

Komposisi jumlah PNS tahun 2025 sebanyak 41 orang, dari jumlah PNS tersebut sebagaimana tersebut pada tabel di atas, Golongan IV 9 orang, Golongan III 29 orang dan golongan II 3 orang. Adapun golongan terbanyak Golongan III terbanyak yaitu sebesar 70,7%.

1.3 SARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlag/satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.3.2.02.001.004.001	000001	Sepeda Motor	Honda / NF 125	JB81189K426633	Besi/Plastik	Hibah	2009	Baik	1
2	1.3.2.02.001.004.001	000002	Sepeda Motor	Honda / NF 125	JB81179K430464	Besi/Plastik	Hibah	2009	Baik	1
3	1.3.2.05.001.004.001	000002	Lemari Besi/Metal	Brother / -	-	Besi	Pembelian	2009	Baik	1
4	1.3.2.05.001.004.005	000001	Filing Cabinet Besi	Brother / -	-	Besi	Pembelian	2009	Baik	1
5	1.3.2.05.001.004.007	000001	Brandkas	A3 / -	-	Besi	Pembelian	2009	Baik	1
6	1.3.2.05.003.001.005	000001	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2009	Baik	1
7	1.3.2.05.003.003.006	000001	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2009	Rusak Berat	1
8	1.3.2.05.001.004.001	000004	Lemari Besi/Metal	Brother / -	-	Besi	Pembelian	2010	Baik	1
9	1.3.2.05.001.004.005	000021	Filing Cabinet Besi	Brother / -	-	Besi	Pembelian	2010	Baik	1
10	1.3.2.10.001.002.010	000007	Personal Komputer lainnya	Intel Core i3 / -	-	Plastik	Pembelian	2010	Baik	1
11	1.3.2.05.001.004.005	000022	Filing Cabinet Besi	Brother / -	-	Besi	Pembelian	2011	Baik	1
12	1.3.2.05.002.001.002	000001	Meja Kerja Kayu	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2011	Rusak Berat	1
13	1.3.2.05.002.001.030	000119 s/d 000120	Kursi Rapat	Montana / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2011	Baik	2
14	1.3.2.05.003.001.007	000033 s/d 000034	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2011	Baik	2
15	1.3.2.05.001.001.002	000003	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) Note Book	Brother / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2012	Baik	1
16	1.3.2.10.001.002.003	000005		Thosiba Satellite / -	-	Plastik	Pembelian	2012	Baik	1
17	1.3.2.05.002.004.006	000008	Kipas Angin	Maspion / Stand	-	Besi/Plastik	Pembelian	2013	Baik	1
18	1.3.2.10.001.002.001	000001	P.C Unit	Intel / Pentium 5	-	Besi/Plastik	Pembelian	2013	Baik	1
19	1.3.2.10.002.003.003	000009	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon PIXMA / -	-	Plastik	Pembelian	2013	Baik	1
20	1.3.2.02.001.003.002	000001	Pick Up	CHOVROLET	MMM148MGODH616721	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
21	1.3.2.02.001.004.001	000003	Sepeda Motor	DOUBLE CABIN / COLORADO LTZ CREW CAB 2.5MT MY12 HONDA SUPRA X 125 / NF125TR5	MH1JB9134DK460939	BESI	Pembelian	2014	Baik	1

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlagn/satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	1.3.2.02.001.004.001	000004	Sepeda Motor	M/T HONDA SUPRA X 125 / NF125TR5	MH1JB9133DK460995	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
23	1.3.2.02.001.004.001	000005	Sepeda Motor	M/T HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF	JB913XEK550601	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
24	1.3.2.02.001.004.001	000006	Sepeda Motor	125 TR) HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF	JB9131EK550602	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
25	1.3.2.02.001.004.001	000007	Sepeda Motor	125 TR) HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF	JB9137EK550586	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
26	1.3.2.02.001.004.002	000001	Scooter	125 TR) HONDA / VARIO TECHNO PGM F1	JFB128EK272753	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
27	1.3.2.05.001.004.001	000021 s/d 000025	Lemari Besi/Metal	A/T) Brother / 2 Pintu	-	Besi	Pembelian	2014	Baik	5
28	1.3.2.05.001.004.002	000002	Lemari Kayu	Lokal / -	-	Kayu/Kaca	Pembelian	2014	Baik	1
29	1.3.2.05.001.004.005	000032 s/d 000038	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 Laci	-	Besi	Pembelian	2014	Baik	7
30	1.3.2.05.001.004.005	000039	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 Laci	-	Besi	Pembelian	2014	Baik	1
31	1.3.2.05.002.001.004	000001	Kursi Kayu	Lokal / -	-	Rotan/Busa	Pembelian	2014	Baik	1
32	1.3.2.05.002.001.008	000003	Meja Rapat	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
33	1.3.2.05.002.001.030	000133 s/d	Kursi Rapat	Polaris / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2014	Baik	59
34	1.3.2.05.002.001.050	000007 s/d 000010	Meubeleur lainnya	Lokal / -	-	Kayu/Kaca	Pembelian	2014	Baik	4
35	1.3.2.05.002.004.004	000006	A.C. Split	LG / 2pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
36	1.3.2.05.002.004.006	000010 s/d 000017	Kipas Angin	Miyako / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	4
37	1.3.2.05.002.004.006	000018 s/d 000019	Kipas Angin	Miyako / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Rusak Berat	2
38	1.3.2.05.002.006.008	000002	Sound System	LG / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
39	1.3.2.05.002.006.077	000002	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / Jam Besar	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
40	1.3.2.05.003.001.004	000002	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
41	1.3.2.05.003.001.005	000009 s/d 000016	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	8

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlag/satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	1.3.2.05.003.001.007	000051 s/d 000092	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	42
43	1.3.2.05.003.003.004	000002	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
44	1.3.2.06.001.002.105	000002	Layar Film/Projector	Infokus / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
45	1.3.2.06.002.001.022	000002	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	Krezt / Wireless	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
46	1.3.2.10.001.002.001	000006 s/d 000016	P.C Unit	Acer Aspire / Intel Corei3	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	10
47	1.3.2.10.001.002.003	000007	Note Book	Asus / Intel Corei3 12	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
48	1.3.2.10.001.002.003	000008	Note Book	Acer / Intel Corei3 11,6"	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Rusak Berat	1
49	1.3.2.10.002.003.003	000016 s/d 000019	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon PIXMA MG2570 / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Rusak Berat	2
50	1.3.2.05.001.001.002	000004 s/d 000006	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Brother / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	3
51	1.3.2.05.001.004.001	000026 s/d 000036	Lemari Besi/Metal	Brother / 2 Pintu	-	Besi	Pembelian	2015	Baik	11
52	1.3.2.05.001.005.077	000001	Papan Pengumuman	Lokal / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
53	1.3.2.05.001.005.077	000002	Papan Pengumuman	Lokal / Struktur Organisasi	-	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
54	1.3.2.05.002.001.014	000001	Meja Resepsionis	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2015	Baik	1
55	1.3.2.05.002.004.001	000002	Lemari Es	Toshiba Glacio / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
56	1.3.2.05.002.006.002	000002	Televisi	Panasonic	-	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
57	1.3.2.05.003.003.005	000009 s/d 000016	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	8
58	1.3.2.05.003.003.006	000017 s/d 000019	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	3
59	1.3.2.05.003.003.006	0000020	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
60	1.3.2.05.003.003.006	000021 s/d 000033	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	12
61	1.3.2.05.003.003.007	000024 s/d 000077	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	19
62	1.3.2.06.001.002.003	000002	Camera Electronic	Sony / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlag/satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	1.3.2.06.001.002.060	000001	Camera Film	Nicon / -		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
64	1.3.2.10.001.002.002	000005 s/d 000008	Laptop	Asus		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	4
65	1.3.2.10.001.002.002	000009	Laptop	Asus		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
66	1.3.2.10.001.002.002	000010 s/d 000012	Laptop	Asus		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	3
67	1.3.2.10.002.003.003	0000023	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pixma ix6560 / A3		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
68	1.3.2.10.002.003.003	0000024	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pixma ix6560 / A3		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
69	1.3.2.02.001.004.002	000002	Scooter	Honda Vario / Vario 125 CBS	MH1JFV119GK513151	Besi	Hibah	2016	Baik	1
70	1.3.2.02.001.004.002	000003	Scooter	ISS Honda Vario / Vario 125 CBS	MH1JFV118GK514324	Besi	Hibah	2016	Baik	1
71	1.3.2.02.001.006.018	000001	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	ISS Daihatsu / Luxio	MHKW3CA3JGK016284	Besi	Hibah	2016	Baik	1
72	1.3.2.05.001.005.012	000002 s/d 000003	Mesin Absensi	Finger Spot / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Baik	2
73	1.3.2.06.002.001.022	000003 s/d 000004	alat komunikasi telephone lainnya	Toa / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Baik	2
74	1.3.2.10.001.002.002	000013	Lap Top	Apple / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Rusak Berat	1
75	1.3.2.10.001.002.002	000014 s/d 000016	Lap Top	Lenovo / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Baik	3
76	1.3.2.10.002.001.012	000003 s/d 000005	Hard Disk	WD My Passport	-	Plastik	Pembelian	2016	Baik	3
77	1.3.2.05.002.006.012	000001	Wireless	Bismarck / -	-	Plastik/besi	Pembelian	2018	Baik	1
78	1.3.2.06.001.002.003	000003	Camera Electronic	Panasonic / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
79	1.3.2.06.002.001.004	000001	Telephone Mobile	Samsung / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
80	1.3.2.10.001.002.003	000009	Note Book	Apple / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
81	1.3.2.10.002.001.012	000006	Hard Disk	WD / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
82	1.3.2.10.002.003.003	000025	Printer (Peralatan Personal)	Canon / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
83	1.3.2.10.002.003.003	000026	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
84	1.3.2.02.001.001.006	000001	kendaraan dinas bermotor	Kijang Inova	MHFAW8EM3K0212816	Besi	Pembelian	2019	Baik	1
85	1.3.2.02.001.004.002	000004	perorangan lainnya (dst) Scooter	Venture / MPV Honda / X1H02N35M1	MH1KF4118KK430656	Besi	Pembelian	2019	Baik	1

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlag/satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	1.3.2.02.001.004.002	000005	Scooter	A/T Honda / X1H02N35M1	MH1KF411XKK430643	Besi	Pembelian	2019	Baik	1
87	1.3.2.05.001.004.003	000001 s/d 000003	Rak Besi	A/T Lokal / -	-	Besi/Kayu	Pembelian	2019	Baik	3
88	1.3.2.05.001.004.005	000040 s/d 000041	Filing Cabinet Besi	Informa / -	-	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
89	1.3.2.05.002.001.003	000001 s/d 000002	Kursi Besi/Metal	Informa / Kursi tunggu	-	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
90	1.3.2.05.002.001.008	000004 s/d 000004	Meja Rapat	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2019	Baik	2
91	1.3.2.05.002.001.025	000001	Kasur/Spring Bed	Lokal / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	1
92	1.3.2.05.002.001.030	000193 s/d 000232	Kursi Rapat	Montana / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	40
93	1.3.2.05.002.001.048	000001	Sofa	Informa / Sofa	-	Busa	Pembelian	2019	Baik	1
94	1.3.2.05.002.001.050	000011 s/d 000014	Meubeleur lainnya	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2019	Baik	4
95	1.3.2.05.002.004.004	000007 s/d 000009	A.C. Split	Panasonic / 2pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
96	1.3.2.05.002.004.004	000010 s/d 000011	A.C. Split	Panasonic /	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
97	1.3.2.05.002.004.004	000012 s/d 000015	A.C. Split	Panasonic /	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	4
98	1.3.2.05.002.004.004	000016	A.C. Split	Panasonic / 2pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
99	1.3.2.05.002.004.004	000017	A.C. Split	Panasonic / 2pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
100	1.3.2.05.002.004.004	000018	A.C. Split	Panasonic / 1pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
101	1.3.2.05.002.004.004	000019 s/d 000021	A.C. Split	Panasonic / 1pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
102	1.3.2.05.002.004.015	000001 s/d 000003	Alat Pendingin lainnya	Imatsu / Air Curtain	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
103	1.3.2.05.002.006.002	000003	Televisi	Panasonic / 1pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
104	1.3.2.05.002.006.002	000004 s/d 000006	Televisi	Panasonic / 1pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
105	1.3.2.05.002.006.008	000003	Sound System	Ashly / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
106	1.3.2.05.002.006.008	000004	Sound System	B&B / Mini	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
107	1.3.2.05.002.006.020	000001 s/d 000002	Stabilisator	Hokimoto / -	-	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
108	1.3.2.05.002.006.038	000001	Dispenser	Sanken / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlagn/satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	1.3.2.05.002.006.038	000002 s/d 000003	Dispenser	Sanken / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
110	1.3.2.05.002.007.001	000001 s/d 000005	Alat Pemadam/Portable	Lokal / -	-	Besi	Pembelian	2019	Baik	5
111	1.3.2.05.003.003.005	0000017	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Informa / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	1
112	1.3.2.05.003.003.006	000034 s/d 000036	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Informa / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	3
113	1.3.2.05.003.005.007	000001 s/d 000003	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Informa / Kursi Pelayanan	-	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	3
114	1.3.2.06.001.001.075	000001	Digital Audio Taperecorder	Sony ICD- TX650 / Voice Recorder	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
115	1.3.2.06.001.002.060	000002	Camera Film	Canon / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
116	1.3.2.06.001.002.060	000003	Canon / Mirrorless	Canon / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
117	1.3.2.06.001.002.060	000004	Camera Film	Go Pro / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
118	1.3.2.06.001.002.105	000001 s/d 000002	Layar Film/Projector	Lokal / Layar Proyektor	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
119	1.3.2.06.001.002.105	000003	Layar Film/Projecto	BENQ MS506p / LCD	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
120	1.3.2.06.001.002.105	000004	Layar Film/Projector	View Sonic m1 / LCD Portable	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
121	1.3.2.06.001.002.105	000005	Layar Film/Projector	LG PH450 / LCD Short Throw	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
122	1.3.2.06.001.002.105	000006	Layar Film/Projector	GP70UP / LCD Mini	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
123	1.3.2.06.001.002.105	000007	Layar Film/Projector	Epson / LCD	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
124	1.3.2.06.002.001.006	000001 s/d 000004	Handy Talky (HT)	Kenwood / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	4
125	1.3.2.07.001.001.004	000001 s/d 000002	Stethoscope (Alat Kedokteran Umum)	ABN Spektrum / -	-	Bes	Pembelian	2019	Baik	2
126	1.3.2.10.001.002.001	000017 s/d 000019	P.C Unit	Lenovo / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
127	1.3.2.10.001.002.001	000020 s/d 000021	P.C Uni	Lenovo / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	2

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlag/satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	1.3.2.10.001.002.002	000017 s/d 000020	Lap Top	Lenovo / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	4
129	1.3.2.10.001.002.002	000021 s/d 000022	Lap Top	Asus / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
130	1.3.2.10.001.002.003	0000010	Note Book	Asus / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
131	1.3.2.10.001.002.003	0000011	Note Book	Lenovo / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
132	1.3.2.10.001.002.010	0000017	Personal Komputer lainnya	Samsung Galaxy / Tablet	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
133	1.3.2.10.002.003.003	0000027	Printer (Peralatan Personal Komputer)	pson / L3110	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
134	1.3.2.10.002.003.003	0000028	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / M200	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
135	1.3.2.10.002.003.003	000029 s/d 000031	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3110	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
136	1.3.2.10.002.003.003	0000032	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
137	1.3.2.10.002.003.003	0000033	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
138	1.3.2.06.001.002.060	000005	Camera Film	Logitech / -	-	Plastik	Pembelian	2020	Baik	1
139	1.3.2.10.002.003.003	000034 s/d 000037	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2020	Baik	4
140	1.3.2.05.001.004.001	000037 s/d 000042	Lemari Besi/Metal	Lokal / 2 Pintu	-	Besi	Pembelian	2021	Baik	6
141	1.3.2.05.001.004.002	000003 s/d 000004	Lemari Kayu	Lokal / Arsip	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	2
142	1.3.2.05.001.004.003	000004 s/d 000009	Rak Besi	Lokal / -	-	Besi/kayu	Pembelian	2021	Baik	6
143	1.3.2.05.002.001.008	000006	Meja Rapat	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	1
144	1.3.2.05.002.001.014	000002 s/d 000003	Meja Resepsionis	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	2
145	1.3.2.05.002.001.036	000001 s/d 000150	Kursi Lipa	Chitose / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2021	Baik	150
146	1.3.2.05.002.001.048	000002 s/d 000003	Sofa	Lokal / -	-	Busa	Pembelian	2021	Baik	2

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlag/satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	1.3.2.05.002.001.048	000004 s/d 000009	Sofa	Lokal / -	-	Busa	Pembelian	2021	Baik	6
148	1.3.2.05.002.004.001	000003 s/d 000007	Lemari Es	Panasonic / 2 Pintu	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	5
149	1.3.2.05.002.004.004	000022 s/d 000031	A.C. Split	Sharp / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	10
150	1.3.2.05.002.004.004	000032 s/d 000051	A.C. Split	Sharp / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	20
151	1.3.2.05.002.004.004	000052 s/d 000093	A.C. Split	Sharp / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	42
152	1.3.2.05.002.006.002	000007	Televisi	Sharp / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
153	1.3.2.05.002.006.038	000004 s/d 000010	Dispenser	Sharp / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	7
154	1.3.2.05.002.006.039	000001	Mimbar/Podium	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	1
155	1.3.2.05.002.006.059	000001	Gordyin/Kray	Shin-Inchi / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
156	1.3.2.05.002.006.077	000003	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Krisbow-Generat or / -	-	Besi	Pembelian	2021	Baik	1
157	1.3.2.05.003.001.004	000003	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	1
158	1.3.2.05.003.001.005	000017 s/d 000022	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	6
159	1.3.2.05.003.001.006	000017 s/d 000034	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	18
160	1.3.2.05.003.001.007	000093 s/d 000144	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	52
161	1.3.2.05.003.003.004	000003	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	-	Besi/bus	Pembelian	2021	Baik	1
162	1.3.2.05.003.003.005	000018 s/d 000023	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	-	Besi/bus	Pembelian	2021	Baik	6
163	1.3.2.05.003.003.006	000037 s/d 000052	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	-	Besi/bus	Pembelian	2021	Baik	16
164	1.3.2.05.003.003.007	000079 s/d 000085	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Chitose / -	-	Besi/bus	Pembelian	2021	Baik	7
165	1.3.2.05.003.003.007	000086 s/d 000130	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Chitose / -	-	Besi/bus	Pembelian	2021	Baik	45
166	1.3.2.06.001.001.041	000001	Professional Sound System	Yamaha Audioline / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlag/satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	1.3.2.06.001.002.045	000001	Tripod Camera	ProGear	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
168	1.3.2.06.001.002.045	000002	Tripod Camera	ProGear (FoxPro) / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
169	1.3.2.06.001.002.055	000001 s/d 000002	Lighting Stand Tripod	GVM / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	2
170	1.3.2.06.001.002.126	000001 s/d 000002	Camera Digital	Nikon / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	2
171	1.3.2.06.001.002.130	000001	Video Conference	Logitech / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
172	1.3.2.06.001.006.001	000001	Alat Studio Lainnya	Hikvision / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
173	1.3.2.06.001.006.001	000002	Alat Studio Lainnya	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
174	1.3.2.10.001.002.001	000022 s/d 000029	P.C Unit	HP / All in One	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	8
175	1.3.2.10.001.002.001	000030	P.C Unit	Asus / Desktop	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
176	1.3.2.10.001.002.002	000023 s/d 000025	Lap Top	Dell / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	3
177	1.3.2.10.002.003.003	000038	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
178	1.3.2.10.002.003.003	000039 s/d 000041	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / A3	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	3
179	1.3.3.01.001.001.001	00003	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	027/052/PBJ/DP3APPKB/ V III/202	Beton	Pembelian	2021	Baik	1
180	1.3.4.04.002.003.001	000001	Jaringan listrik lainnya	-	027/052/PBJ/DP3APPKB/ V III/202	-	Pembelian	2021	Baik	1
181	1.3.2.05.001.001.008	00001	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	Brother / GX-6750	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
182	1.3.2.05.001.004.001	000043	Lemari Besi/Metal	Brother / Lemari Besi 3 rak	-	Besi	Pembelian	2022	Baik	1
183	1.3.2.05.001.004.001	000044	Lemari Besi/Metal	Brother / Lemari Besi 3 Rak	-	Besi	Pembelian	2022	Baik	1
184	1.3.2.05.001.004.002	000005 s/d 000006	Lemari Kayu	Lokal / Loker	-	Kayu	Pembelian	2022	Baik	2
185	1.3.2.05.001.004.027	00005	Lemari Kaca	Lokal / Lemari Pakaian	-	Kayu-Kaca	Pembelian	2022	Baik	1
186	1.3.2.05.001.004.027	00006	Lemari Kaca	Lokal / Lemari Sepatu	-	Kayu-Kaca	Pembelian	2022	Baik	1

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlag/satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	1.3.2.05.001.005.077	00003	Papan Pengumuman	Lokal / Struktur Organisasi	-	Plastik/Besi	Pembelian	2022	Baik	1
188	1.3.2.05.001.005.077	00004	Papan Pengumuman	Lokal / whiteboard	-	Kayu-Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
189	1.3.2.05.001.005.077	00005	Papan Pengumuman	Lokal / Papan Pengumuman	-	Besi-Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
190	1.3.2.05.001.005.077	00006	Papan Pengumuman	Lokal / Papan Pengumuman	-	Plastik/Besi	Pembelian	2022	Baik	1
191	1.3.2.05.001.005.077	00007	Papan Pengumuman	Lokal / Papan Pengumuman	-	Plastik/Besi	Pembelian	2022	Baik	1
192	1.3.2.06.001.006.001	00003	Alat Studio Lainnya	P8 Outdoor	-	-	Pembelian	2022	Baik	1
193	1.3.2.06.002.001.004	00002	Telephone Mobile	Realme / 5G	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
194	1.3.2.06.002.001.004	000003 s/d 000004	Telephone Mobile	Samsung Galaxy A23 / Android	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	2
195	1.3.2.10.001.002.001	000031 s/d 000035	P.C Unit	HP / All in one PC	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	5
196	1.3.2.10.001.002.003	000012	Note Book	MSI CF633 / Core i7	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
197	1.3.2.10.001.002.003	000013 s/d 000014	Note Book	MSI Pulse / Core i9	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	2
198	1.3.2.10.001.002.009	00001	Tablet PC	Samsung Galaxy / Android Tab S6	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
199	1.3.2.10.002.001.012	000007 s/d 000011	Hard Disk	Seagate / One Touch 1 T	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	5
200	1.3.2.10.002.002.009	00001	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Epson / Workforce ES-50	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
201	1.3.2.10.002.003.003	000042	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Laserjet	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlagn/satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	1.3.2.10.002.003.018	000001 s/d 000004	Peralatan Personal Komputer lainnya	Inforce / Uninterruptible Power Suply (UPS)	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	4
203	1.3.3.01.001.033.001	00001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	-	027/041/PBJ/DP3APPKB/ V/2022	Beton	Pembelian	2022	Baik	1
204	1.3.3.01.001.033.001	00002	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	-	027/105/PBJ/DP3APPKB/ XI/2022	Beton	Pembelian	2022	Baik	1
205	1.3.2.02.001.002.002	00001	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Toyota / HI ACE PREMIO 2.8 M/T	JTF2A9CP2P6002785	Besi	Pembelian	2023	Baik	1
206	1.3.2.05.002.001.001	000001 s/d 000020	Meja Kerja Besi/Metal	Lokal / Meja Lipat	-	Besi	Pembelian	2023	Baik	20
207	1.3.2.05.002.001.008	00007	Meja Rapat	Lokal / --	-	Kayu	Pembelian	2023	Baik	1
208	1.3.2.05.002.001.031	00003	Kursi Tamu	Lokal / --	-	Kayu	Pembelian	2023	Baik	1
209	1.3.2.05.003.003.009	00001	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Lokal / --	-	Besi/Busa	Pembelian	2023	Baik	4
210	1.3.2.08.001.011.208	00001	alat laboratorium umum lainnya (dst)	Camrera Video Converence		Plastik	Pembelian	2023	Baik	1
211	1.3.2.08.001.011.208	00002	alat laboratorium umum lainnya (dst)	Camera Recorder		Plastik	Pembelian	2023	Baik	1
212	1.3.2.08.001.056.081	000001 s/d 000002	Meja Kerja	Lokal / Meja Lipat Panjang		Bes	Pembelian	2023	Baik	2
213	1.3.2.10.001.002.002	000026 s/d 000033	Lap Top	- / -		Plastik	Pembelian	2023	Baik	8
214	1.3.2.10.002.002.009	00002	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Epson / -		Plastik	Pembelian	2023	Baik	1
215	1.3.2.10.002.003.003	000043 s/d 000048	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -		Plastik	Pembelian	2023	Baik	6
216	1.3.3.01.001.036.001	00002	Taman Permanen	-	12/SPK/PP/DP3APPKB/2 02		Pembelian	2023	Baik	1
217	1.3.3.04.001.004.001	00006	Pagar Permanen	-	12/SPK/PP/DP3APPKB20 23	Beton	Pembelian	2023	Baik	1
218	1.3.2.05.001.004.002	000007 s/d 000022	Lemari Kayu	Lokal / Lemari Kayu 2 pintu	-	Kayu	Pembelian	2024	Baik	16
219	1.3.2.05.002.001.002	000031	Meja Kerja Kayu	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2024	Baik	1

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlag/satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	1.3.2.05.002.001.048	000010	Sofa	Lokal / Kursi Kayu	-	Kayu	Pembelian	2024	Baik	1
221	1.3.2.05.002.003.003	00001	Mesin Pemotong Rumput	- / -	-	Besi	Pembelian	2024	Baik	1
222	1.3.2.05.002.004.006	000020 s/d 000023	Kipas Angin	Sekai / Kipas angin embun	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	4
223	1.3.2.05.002.006.002	000008 s/d 000009	Televis	Smart TV	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	2
224	1.3.2.05.002.006.007	000005 s/d 000006	Loudspeaker	- / -	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	2
225	1.3.2.05.003.002.011	00001	Meja Tamu Biasa	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2024	Baik	1
226	1.3.2.05.003.005.007	000004 s/d 000005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	- / -	-	Plastik-Busa	Pembelian	2024	Baik	2
227	1.3.2.06.001.002.105	000008 s/d 000010	Layar Film/Projecto	Epson / LCD Proyektor	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	3
228	1.3.2.10.001.002.002	000034 s/d 000047	Lap Top	Acer / --	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	14
229	1.3.2.10.001.002.009	00002	Tablet PC	Samsung / Tablet Android	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	1
230	1.3.2.10.002.001.012	000012	Hard Disk	Samsung / Tablet Android	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	1
231	1.3.2.10.002.003.003	000049 s/d 000063	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Seagate / Harddisk	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	15
232	1.3.2.10.002.003.009	00001	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Samsung / Cover		Plastik	Pembelian	2024	Baik	1
233	1.3.3.01.001.013.001	00001	Gedung Pos Jaga Permanen	-	027/13/SPK/PL-KONST/DP3APPKB	Beton	Pembelian	2024	Baik	1
234	1.3.3.01.001.033.001	00003	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	-	027/13/SPK/PL-KONST/DP3APPKB		Pembelian	2024	Baik	1
235	1.3.3.04.001.004.001	00005	Pagar Permanen	-	027/13/SPK/PL-KONST/DP3APPKB	Beton	Pembelian	2024	Baik	1
236	1.3.2.05.002.001.039	00002	Meja Komputer	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2011	Rusak Berat	1

1.4. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, dapat dirangkum sebagai berikut :

- a) Peningkatan Kesetaraan Gender (gender equality) di Provinsi Kalimantan Tengah

- b) Internalisasi dan Penguatan Aksi Pemenuhan Hak Anak Lintas Sektor dan di seluruh level pemerintahan sebagai upaya percepatan pencapaian 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/Kota layak Anak baik itu Pemenuhan dan perlindungan Hak Anak
- c) Pencegahan dan Penanganan terhadap Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pelibatan Peran serta Masyarakat
- d) Pencegahan dan Pendampingan/Advokasi terhadap Tindakan Perdagangan Orang (TPPO) secara Berkelanjutan
- e) Edukasi berbasis Masyarakat untuk Pencegahan Stunting dengan pendekatan Keluarga
- f) Edukasi berbasis Masyarakat untuk Pencegahan pernikahan Pada Usia Anak Upaya Strategis Penguatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen dan Lembaga Publik Lainnya
- g) Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas Perempuan pelaku Ekonomi Sektor Informal terutama Pelaku Pemula Industri Rumahan dengan Pendekatan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak

1.6. CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja ini untuk memberikan gambaran keterhubungan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Renstra DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, serta tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas sebagai jabaran dari visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2021 s.d 2026 dan strategi bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Keterkaitan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 -2026 dengan Renstra Tahun 2021-2026 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada periode 2021 -2026 adalah :

VISI :

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

MISI :

- 1) Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan;
- 2) Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global;

- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi;
 - 4) Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing;
 - 5) Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.
- Mengacu pada Misi Keempat yaitu “Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing” dan Misi Kelima yaitu “Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender”.

Pokok Misi keempat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- 2) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- 3) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;
- 1) 5) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui
- 5) Peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

Pokok Misi Kelima, dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- 2) Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- 3) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- 4) Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;

- 5) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Misi Keempat dan Misi Kelima di mana Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan dipaparkan secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

1.7. CASCADING DINAS P3APPKB

Cascading kinerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan proses penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam target kinerja yang lebih operasional dan terukur pada setiap jenjang organisasi. Cascading ini dilakukan untuk memastikan adanya keterkaitan dan keselarasan antara visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P3APPKB, sehingga seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Melalui cascading kinerja, sasaran strategis Dinas P3APPKB yang bersumber dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dijabarkan secara sistematis ke dalam indikator kinerja utama perangkat daerah, kemudian diturunkan lagi ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana. Penjabaran tersebut menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar tetap berada dalam satu arah kebijakan yang sama dan saling mendukung.

Selanjutnya, target kinerja yang telah ditetapkan pada tingkat organisasi dan unit kerja dicascading hingga ke tingkat individu aparatur melalui penetapan Sasaran Kinerja Pegawai. Dengan demikian, setiap pegawai memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran dan kontribusinya dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas P3APPKB secara keseluruhan. Hal ini mendorong terciptanya keterpaduan antara pelaksanaan tugas sehari-hari dengan sasaran strategis organisasi, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja individu. Penerapan cascading kinerja di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah juga didukung oleh proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Hasil pemantauan

tersebut dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sekaligus sebagai dasar pengambilan keputusan strategis agar pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya cascading kinerja yang terstruktur dan konsisten, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang berkeadilan gender, ramah anak, dan memiliki keluarga yang berkualitas serta sejahtera. Penerapan cascading kinerja yang konsisten memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program di Dinas P3APPKB. Selain meningkatkan kejelasan arah kebijakan dan keterpaduan antarunit kerja, cascading kinerja juga mendorong terwujudnya budaya kerja yang berorientasi pada hasil, transparan, dan akuntabel. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan peran Dinas P3APPKB dalam mendukung terwujudnya masyarakat Kalimantan Tengah yang berkeadilan gender, ramah anak, terkendali pertumbuhan penduduknya, dan memiliki keluarga yang berkualitas serta sejahtera.

Dalam pelaksanaannya, cascading kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh sistem pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi kinerja digunakan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran serta mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan penyesuaian kebijakan pada periode berikutnya.

1.8. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan dari Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DP3AKPPKB yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut :

1. Secara umum DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Penyusunan dokumen perencanaan telah dijabarkan ke berbagai sasaran dan indikator kinerja keseluruhan ASN di semua level. Hal yang perlu diperhatikan

adalah ketercukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan tercapainya kinerja;

3. Belum sepenuhnya dilakukan monitoring dan evaluasi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun;
4. Implementasi Akuntabilitas Kinerja salah satu budaya kinerja masih bersifat parsial dan belum dilaksanakan secara merata pada seluruh instansi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah disusun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun bertujuan untuk mewujudkan kinerja Output maupun Outcome, serta untuk mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Perjanjian Kinerja DP3PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2025 dan melaporkannnya dalam LAKIP, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DP3APPKB TAHUN 2021- 2026

Pada Tahun 2025, DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 6 (enam) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra DP3APPKB Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		89,07	89,09	89,11	89,13	89,15
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,9	81,92	81,94	81,96	81,98
				Persentase ARG pada belanja APBD Daerah	3,43%	3,50%	3,60%	3,70%	4,00%
2	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan								

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		Meningkatkan pelayanan terhadap tindakan kekerasan secara komprehensif		Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	85%	87,50%	90%	92,50%	95%
3	Meningkatkan Kualitas hak Anak dan Perlindungan khusus terhadap anak								
		Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,83	63,68	65,59	67,55	69,57
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	50%	55%	60%	65%	70%
4	Meningkatkan Kualitas data gender dan anak								
		Mengoptimalkan kualitas data gender dan anak		Jumlah ketersediaan data gender dan anak pada DP3A tingkat Kab/Kota se Kalimantan Tengah	6 Kab/kota	8 Kab/Kota	10 Kab/Kota	12 Kab/Kota	14 Kab/Kota
5	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mPCR)		73,23	73,68	74,26	74,26	74,26
		Meningkatkan kualitas keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	62,44	64,55	64,55	64,55
				Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,1	2,06	2	1,96	1,96

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9
				Angka Kelahiran Remaja umur 15-29 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR)	21	20	18	16	16
		Meningkatnya Akseptor KB		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Contraceptive (mPCR)	73,23	73,68	74,26	74,26	74,26
				Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5,36%	5,18%	5%	5,01%	5,01%
6	Meningkatkan tata kelola organisasi peran gkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat		70	74	77	80	85
		Meningkatnya akutanbilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Untuk menunjang pencapaian 5 (lima) Sasaran Strategis Tahun 2025 didukung dengan pagu anggaran APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 17.984.560.982,-. Adapun Perjanjian Kinerja serta Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang mendukung tercapainya sasaran Renja dan Renstra DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	81,96
2.	Mengoptimalkan kualitas Data Perempuan dan Anak pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ketersediaan Data pada DP3APPKB tingkat kab/kota se Provinsi Kalimantan Tengah	Kab/kota	14

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025
3.	Meningkatkan Pemenuhan hak dan Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,55
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	65
4.	Meningkatnya Pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100
5.	Meningkatkan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	persen	64,36
		Angka Kelahiran Total/Total Vertility Rate (TFR)	angka	2,24
6	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	BB

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Rp12.188.952.098
2.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 764.830.381
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp 376.780.533
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 5.634.940
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp 68.342.446
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 113.971.046
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 564.867.868
8.	Program Pengendalian Penduduk	Rp 12.000.000
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 218.813.277
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	Rp 128.996.132

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

Tingkat Realisasi Positif : $\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Tingkat Realisasi Negatif : $\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$

Sedangkan untuk kategori capaian digunakan sebagai berikut :

Rentang Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100%	Sangat Baik
75% sampai dengan 100%	Baik
55% sampai 75 %	Cukup
Kurang dari 55%	Kurang

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

Keberhasilan pencapaian Tujuan ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,96	74,6	91,02

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 81,96 dan realisasi capaian sebesar 74,60 tingkat capaian sebesar 91,02%. Dimana capaian hasil kesetaraan gender dan pemberdayaan di Kalimantan Tengah sudah cukup berhasil. Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien.

Dampak/ Outcome dalam keberhasilan IDG di Kalimantan Tengah dimana pembangunan memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama dimana pemberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada Perempuan sudah berjalan selaras. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didukung dari 3 (tiga) komponen, yaitu :

- 1. Keterlibatan perempuan dalam parlemen
- 2. Perempuan sebagai tenaga profesional
- 3. Sumbangan pendapatan perempuan

Capaian terhadap masing-masing komponen IDG menunjukkan adanya upaya dalam pembangunan yang responsif gender yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender sesuai amanah SDGs dan RPJMN 2019-2024 serta RPJMD 2021-2026 Provinsi Kalimantan tengah yaitu terwujudnya Kesetaraan Gender, melalui kemudahan AKSES perempuan dalam segala bidang pembangunan; memberikan kesempatan bersuara atau PARTISIPASI; dimudahkan untuk dapat bagian dalam ikut mengambil keputusan atau KONTROL pembangunan serta menerima hasil atau MANFAAT pembangunan yang dilihat melalui indikator-indikator komponen pendukung IDG tersebut.

Tabel 3.2. Progres Realisasi Kinerja Tahun 2025 dari tahun sebelumnya

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,92	81,24	82,08	81,98	79,99	74,6

Realisasi IDG di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 82,41. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi IDG sebesar 82,08 , dan pada tahun 2023 capaiannya 81,98 menurun 1,9 poin dibandingkan dengan IDG Tahun 2022. Pada Tahun 2024 menurun kembali dari 1,99 poin dibandingkan IDG Tahun 2023 dikarenakan menurunnya keterlibatan Perempuan di parlemen Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, meingkat naik 79,99 di Tahun 2024 dan stabil relatif menurun di tahun 2025 menjadi 74,6.

Tabel 3.3. Komponen Pendukung IDG Kalimantan Tengah

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
1	2	3	4	5
2020	35,56	43,35	33,4	83,2
2021	33,33	46,12	33,63	82,41
2022	33,33	47,36	33,48	82,08
2023	33,33	43,8	33,37	81,98
2024	28,89	50,86	33,13	79,99

Keterangan :

*Data 2025 belum rilis, tahun 2025 menggunakan data update dari SIGA Kementerian PPPA 2024

Berdasarkan capaian dalam tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2020 sebesar 35,56%. Komponen ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 33,33 %. Komponen keterlibatan perempuan di parlemen di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 tetap dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 33,33% sampai tahun 2023. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan yaitu menjadi 28,89%. Komponen perempuan di perlemen di Kalimantan Tengah lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 21,74%.
2. Perempuan sebagai Tenaga Profesional, pada tahun 2020 sebesar 43,35% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 46,12%.Komponen ini mengalami kenaikan sebesar 7,23 poin, jika dibandingkan tahun 2021 Komponen perempuan sebagai tenaga professional di Kalimantan Tengah meningkat yaitu sebesar 47,36%, meningkat 1,24 poin. Pada tahun 2023 43,80 menurun menjadi 3,56 poin. Terjadi peningkatan pada tahun 2024 yaitu menjadi 50,86%. Komponen perempuan sebagai tenaga professional di Kalimantan Tengah sudag berhasil dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 48,65%.
3. Sumbangan Pendapatan Perempuan, pada tahun 2020 sebesar 33,40% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 33,63%. Komponen ini mengalami peningkatan sebesar 0,23 poin jika dibandingkan tahun 2020, Tahun 2021 mengalami penurunan 33,48% sebesar 85 poin. Pada tahun 2023 33,37 menurun dari tahun 2022 yaitu 11 poin. Pada tahun 2024 33,14 yaitu 14 menurun dari tahun 2022 0,24 poin. Komponen Sumbangan pendapatan perempuan di Kalimantan Tengah lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 37,17%.

Menurut penjelasan komponen IDG dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan kinerja pada 1 (satu) komponen IDG, yaitu Keterlibatan perempuan di parlemen yang dikarenakan pada tahun 2024 terjadi penurunan persentase Perempuan yang mendaftar menjadi wakil rakyat (calon legislative) yang mempengaruhi capaian IDG Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut ini adalah Capaian IDG dan komponennya menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Dimana masing-masing bervariasi bahkan ada Kabupaten/Kota yang capaiannya lebih tinggi dibandingkan provinsi. Capaian IDG ini tidak bersifat kumulatif dari Kabupaten/Kota. Sehingga capaian Kabupaten/Kota tidak bisa mendorong capaian provinsi.

Tabel 3.4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponennya Tahun 2025

1	Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
1	Kotawaringin Barat	20	50,28	24,47	66,18
2	Kotawaringin Timur	22,5	52,65	25,93	70,4
3	Kapuas	27,5	49,9	27,92	74,37
4	Barito Selatan	44	56,78	37,05	86,33
5	Barito Utara	36	48,91	41,35	87,08
6	Sukamara	25	47,61	20,48	67,53
7	Lamandau	20	46,9	28,57	71,4
8	Seruyan	16	54,89	27,33	66,83
9	Katingan	16	50,4	29,98	68,19
10	Pulang Pisau	28	49,35	22,66	71,01
11	Gunung Mas	44	49,28	49,94	89,29
12	Barito Timur	28	59,16	42,85	81,48
13	Murung Raya	16	58,68	29,79	66,69
14	Palangka Raya	36,67	47,89	32,16	81,85
Kalimantan Tengah		28,89	50,86	33,13	79,99
Indonesia		21,74	48,65	37,17	76,59

Sumber Data: DP3APPKB Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Kalimantan Tengah	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,6	77,62	3,4

Pada Tahun 2024, angka IDG Nasional sebesar 77,62 lebih tinggi 3,02 poin dari angka IDG Kalteng sebesar 74,60. Hal ini dikarenakan dari komponen keterlibatan perempuan di parlemen Kalimantan Tengah lebih rendah dari nasional sebesar, komponen perempuan sebagai tenaga professional sebesar dan sumbangan pendapatan perempuan Kalteng lebih rendah dari nasional. Analisa Ketercapaian Kinerja IDG Kalimantan Tengah berdasarkan data tahun 2025 74,60 masuk kategori tinggi . Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. BPS kemudian merumuskan hasil analisisnya ke dalam skor 0-100 poin, dengan kategori penilaian sebagai berikut:

- Rendah : IDG<50
- Sedang : 50≤IDG<60
- Tinggi : 60≤IDG≤80
- Sangat tinggi : IDG>80

Anggaran tersedia pada dana APBD 2025 program Pengarustamaan gender dan Pemberdayaan perempuan berjumlah Rp. 764.830.381,02. Dengan kerjasama tim bidang teknis dan semua ASN DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja IDG merupakan upaya yang saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif) Dinas P3APPKB Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dinas terkait, perlemen (legislatif), maupun yudikatif dan semua komponen jejaring lembaga masyarakat, swasta dan lainnya serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

**Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Pelayanan terhadap tindak kekerasan secara Komprehensif**

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 (satu) diukur melalui indikator Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif, adapun capaian :

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Tahun 2024 - 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	7	8	9	7	8	9
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif	100%	100%	102,11	100%	100%	102,87

Dapat dilihat dari capaian persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif pada tahun 2024 sebesar 102,11 dan pada tahun 2025 mencapai target 102,87 melebihi dari target. Dimana dengan adanya layanan yang ada di UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah memberikan layanan GRATIS sampai selesai untuk korban kekerasan pada Perempuan dan TPPO di Kalimantan Tengah. Keberhasilan Promosi yang gencar melalui media cetak, elektronik dan dengan adanya UPTD di Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah sehingga masyarakat mulai tidak malu untuk datang ke tempat pelayanan yang disediakan Pemerintah.

Data Capaian Layanan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah tahun 2025, dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.7. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tahun 2025

No.	Unit / Instansi	Kasus	Korban		Terlayani				
			L	P	L	P	%L	%P	% Total
1.	Kota Waringin Barat	37	0	37	0	37	0	100	100
2.	Kota Waringin Timur	29	0	29	0	29	0	100	100
3.	Kapuas	21	0	21	0	21	0	100	100
4.	Barito Selatan	15	0	17	0	17	0	100	100
5.	Barito Utara	7	0	7	0	7	0	100	100
6.	Sukamara	3	0	4	0	4	0	100	100
7.	Lamandau	4	0	4	0	4	0	100	100
8.	Seruyan	2	0	2	0	2	0	100	100
9.	Katingan	11	0	11	0	11	0	100	100
10.	Pulang Pisau	4	0	4	0	4	0	100	100
11.	Gunung Mas	4	0	4	0	4	0	100	100
12.	Barito Timur	0	0	0	0	0	0		0
13.	Murung Raya	3	0	3	0	3	0	100	100
14.	Kota Palangka Raya	28	0	28	0	28	0	100	100
TOTAL		168	0	0	0	0	0	100	100

Dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Tengah telah terbentuk UPTD PPA yaitu :

Tabel 3.8. Kelas UPT PPA Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/kota	Kelas	Peraturan/Regulasi
1.	Provinsi Kalimantan Tengah	A	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2019
2.	Palangka Raya	A	Peraturan Walikota Palangkaraya No 48 Tahun 2020
3.	Katingan	B	Peraturan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2021
4.	Kotawaringin Timur	A	Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 62 Tahun 2022
5.	Seruyan	B	Peraturan Bupati Seruyan Nomor 63 Tahun 2022
6.	Kotawaringin Barat	A	Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2021
7.	Lamandau	B	Peraturan Bupati Lamandau Nomor 74 Tahun 2020
8.	Pulang Pisau	B	Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2021
9.	Kapuas	B	Peraturan Bupati Kapuas Nomor 7 Tahun 2021
10.	Barito Selatan	B	Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 67 Tahun 2022
11.	Barito Utara	A	Peraturan Bupati Barito Utara No. 35 Tahun 2018
12.	Gunung Mas	B	Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 46 Tahun 2022
13.	Barito Timur	A	Dalam Proses
14.	Murung Raya	A	Dalam Proses/Harmonisasi Perbup
15.	Sukamara	B	Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2024

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya pemenuhan Hak dan Perlindungan Terhadap Anak

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 3 (tiga) diukur melalui Indikator Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif, Adapun capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Indikator Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif Tahun 2024-2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Terhadap Anak	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	90	90	100	65	65	100

Capaian Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif pada tahun 2024 sebesar 100 % dimana untuk sasaran meningkatnya Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif belum mencapai target.

Tabel 3.7. Persentase layanan anak yang dilayani secara komprehensif Kabupaten/kota se Kalimantan Tengah Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Korban		Jumlah Korban Terlayani	
		L	P	% L	% P
1	Kotawaringin Barat	9	30	100	100
2	Kotawaringin Timur	8	35	100	100
3	Kapuas	7	29	100	100
4	Barito Selatan	16	14	100	100
5	Barito Utara	1	6	100	100
6	Sukamara	1	11	100	100
7	Lamandau	0	10	0	100
8	Seruyan	0	7	0	100
9	Katingan	1	26	100	100
10	Pulang Pisau	1	7	100	100
11	Gunung Mas	2	21	100	100
12	Barito Timur	0	6	0	100
13	Murung Raya	2	8	100	100
14	Kota Palangka Raya	14	40	100	100

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Korban		Jumlah Korban Terlayani	
		L	P	% L	% P
Total		62	250	100	100

Sumber : UPTD PPA KAbupaten/Kota

Output/hasil dari capaian program 100% dimana kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian aoutput 100% pada tahun 2024. Dampak/ Outcome dalam keberhasilan adalah Pemerintah hadir dalam perlindungan terhadap kasus kekerasan terhadap Anak di Kalimantan Tengah dan Menyiapkan Sumber Daya Unggul mulai dari Pemenuhan dan Perlindungan secara dini dalam di Kalimantan Tengah yang BERKAH.

Sasaran Strategis 4 :
Meningkatnya Kualitas Keluarga

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 4 diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) dan Angka kelahiran Total/Total Fertility rate (TFR)

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) dan Angka kelahiran Total/Total Fertility rate (TFR) Tahun 2024-2025

No.	Sasaran Strategis	IndikatorKinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	64,55	62,55	96,90	64,36	62,36	97,45
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,25	2,28	98,68	2,24	2,26	99,11

Sumber : SIGA Perwakilan BKKBN Kalteng

Capaian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) pada tahun 2025 capaian sebesar 97,45 tercapai karena masuk kategori baik , dimana kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua Kabupaten/kota belum terpenuhi. IBangga merupakan indikator penting untuk

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga di Kalimantan Tengah.

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Indikator iBangga Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun 2025

No	Kabupaten/kota	iBangga 2025	Dimensi		
			Ketentraman	Kemandirian	Kebahagiaan
1	Barito Selatan	61,98	59,08	54,62	72,23
2	Barito Timur	65,47	61,36	59,03	76,03
3	Barito Utara	64,27	61,65	57,06	74,09
4	Gunung Mas	61,74	59,68	57,83	67,72
5	Kapuas	57,45	55,29	48,82	68,25
6	Katingan	64,24	60,37	55,70	76,64
7	Palangka Raya	64,05	64,03	57,66	70,45
8	Kotawaringin Barat	64,27	60,82	58,11	73,89
9	Kotawaringin Timur	62,02	59,01	55,44	71,60
10	Lamandau	64,02	58,95	57,47	75,66
11	Murung Raya	66,11	64,95	58,17	75,20
12	Pulang Pisau	60,17	56,78	52,82	70,90
13	Seruyan	64,43	63,89	57,30	72,09
14	Sukamara	66,67	65,34	58,76	75,93

Sumber : SIGA Perwakilan BKKBN Kalteng

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Untuk iBangga Kalimantan Tengah Tahun 2025 terjadi peningkatan capaian iBangga yang cukup signifikan di Kalimantan Tengah pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah dan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam meningkatkan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah. Perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan KB, serta intensifikasi edukasi dan promosi program KB juga berkontribusi pada peningkatan capaian iBangga.

Adapun beberapa Faktor Pendukung, antara lain:

1. Komitmen Pemerintah Daerah:
 - a) Dukungan politik dan anggaran dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan keberhasilan program iBangga.
 - b) Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai
 - c) cara, seperti:

- d) Menetapkan kebijakan dan peraturan yang mendukung program iBangga.
 - e) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program iBangga.
 - f) Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang efektif.
 - g) Melakukan monitoring dan evaluasi program iBangga secara berkala.
2. Kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting:
- a) Tim Percepatan Penurunan Stunting memiliki peran penting dalam memastikan program iBangga berjalan dengan efektif.
 - b) Tim ini harus terdiri dari berbagai pihak terkait, seperti:
 - BKKBN
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Pendidikan
 - Dinas Sosial
 - Akademisi, dan sektor lainnya
 - c) Tim Percepatan Penurunan Stunting harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan program iBangga.
3. Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Keluarga Berkualitas:
- a) Salah satu kunci utama untuk meningkatkan capaian iBangga adalah dengan memastikan semua masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap layanan Keluarga Berkualitas.
 - b) Upaya yang dapat dilakukan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan Keluarga Berkualitas, antara lain:
 - c) Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan
 - d) Keluarga Berkualitas.
 - e) Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam memberikan layanan KB.
 - f) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk layanan KB.
 - g) Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan KB.
4. Intensifikasi Edukasi dan Promosi Program Keluarga Berkualitas:
- a) Edukasi dan promosi program Keluarga Berkualitas yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang program iBangga.
 - b) Upaya yang dapat dilakukan untuk intensifikasi edukasi dan promosi program Keluarga Berkualitas, antara lain:
 - c) Melakukan kampanye dan sosialisasi program iBangga melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan penyuluhan.

- d) Memberikan edukasi dan informasi tentang program Keluarga Berkualitas kepada kelompok sasaran, seperti remaja, pasangan muda, dan ibu hamil.
- e) Melakukan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku untuk mengubah norma sosial dan budaya yang tidak mendukung program Keluarga Berkualitas.

Adapun beberapa Faktor Penghambat, antara lain:

1. Kualitas Data dan Informasi:

- a) Kualitas data dan informasi yang masih perlu ditingkatkan dapat menghambat capaian iBangga di Kalimantan Tengah.
- b) Data dan informasi yang tidak akurat dan tidak terkini dapat menyebabkan: Perencanaan program yang tidak tepat sasaran.
- c) Monitoring dan evaluasi program yang tidak efektif.
- d) Pengambilan keputusan yang tidak tepat.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi, antara lain:

- a) Memperkuat sistem pendataan dan pelaporan program iBangga.
- b) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader dalam pengumpulan dan pengolahan data.
- c) Melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala.

2. Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting:

- a) Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting yang masih perlu diperkuat dapat menghambat capaian iBangga di Kalimantan Tengah.
- b) Tim yang tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan program iBangga dapat menyebabkan:
- c) Program yang tidak berjalan dengan efektif.
- d) Target program yang tidak tercapai.
- e) Kualitas program yang tidak optimal.
- f) Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kapasitas Tim
- g) Percepatan Penurunan Stunting, antara lain:
- h) Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota
- i) Tim Percepatan Penurunan Stunting.
- j) Menyediakan dukungan teknis dan pendanaan yang memadai.
- k) Membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait.

3. Norma Sosial dan Budaya:

- a) Norma sosial dan budaya yang belum sepenuhnya mendukung program KB dapat menghambat capaian iBangga di Kalimantan Tengah.

- b) Norma dan budaya yang tidak mendukung program KB dapat menyebabkan:
- c) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program KB.
- d) Stigma dan diskriminasi terhadap pengguna KB.
- e) Perkawinan Usia Anak.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah norma sosial dan budaya yang tidak mendukung program KB, antara lain:

- a) Melakukan edukasi dan komunikasi perubahan perilaku.
- b) Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuka adat dalam promosi program KB.
- c) Melakukan advokasi dan kebijakan untuk mendukung program
- d) KB.

Meskipun ada beberapa hambatan dalam mencapai capaian iBangga di Kalimantan Tengah. Upaya yang terarah dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan capaian iBangga dapat terus meningkat dan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah dapat semakin baik. Begitu juga dengan keberhasilan program iBangga sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah, kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting, perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan KB, serta intensifikasi edukasi dan promosi program KB. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan capaian iBangga dapat terus meningkat dan kualitas keluarga di Indonesia dapat semakin baik. Capaian iBangga di Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2025 yaitu 62,72. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah telah menunjukkan hasil yang positif.

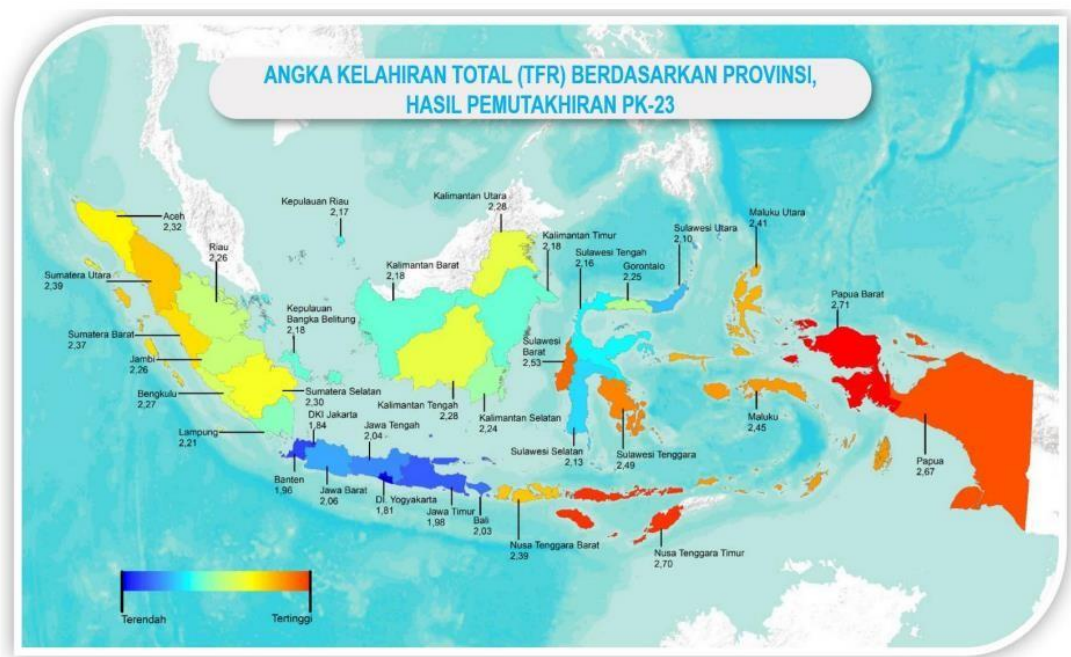
1. Output/hasil capaian program iBangga Kalimantan Tengah Tahun 2025

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan sebuah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas keluarga di Indonesia. Indeks ini dihitung berdasarkan 12 indikator yaitu Kesertaan KB, Stunting, ASI Eksklusif, Imunisasi Dasar Lengkap, Sanitasi, Air Minum Layak, Pemanfaatan Layanan Kesehatan, Pendidikan Anak Usia Dini, Perlindungan Anak, Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Keluarga yang dikelompokkan ke dalam 3 dimensi, yaitu Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Peningkatan nilai Indeks iBangga di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa kualitas keluarga di Kalimantan Tengah semakin baik.

Output/hasil capaian program iBangga Kalimantan Tengah Tahun 2025 menunjukkan bahwa program iBangga telah menunjukkan hasil yang positif. Peningkatan nilai Indeks iBangga pada tahun 2025 dengan capaian 62,72 menunjukkan bahwa kualitas keluarga di Kalimantan Tengah semakin baik. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga perlu dilakukan secara komprehensif dan holistik, dengan mempertimbangkan semua dimensi iBangga.

2. Output/hasil capaian program Total Fertility Rate (TFR) Kalimantan Tengah Tahun 2025

Total Fertility Rate (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun merupakan jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. Total Fertility Rate (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun pada tahun 2024 capaian 2,28. Untuk tahun 2025 capaian 2,26 meningkat dari tahun 2024. Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara ataupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang). Dengan TFR 2,1 maka 2 orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya. Adapun capaian TFR (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun 2022, dapat dilihat pada table dibawah ini:



Gambar 3.1 Sebaran Data (TFR) Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah

TFR di Kalimantan Tengah menunjukkan 2,28 anak per perempuan di tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. TFR 2,28 di Kalimantan Tengah Tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata seorang perempuan di Kalimantan Tengah melahirkan 2,28 anak selama masa reproduksinya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional TFR 2.06 anak per perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Tengah.

Adapun beberapa Faktor Pendukung, antara lain:

1. Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan KB:
 - a) Perluasan Akses Layanan KB:
 - b) Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan KB, seperti puskesmas, klinik KB, dan posyandu.
 - c) Peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam memberikan layanan KB.
 - d) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk layanan KB.
 - e) Peningkatan Kualitas Layanan KB:
 - f) Peningkatan mutu pelayanan KB.
 - g) Peningkatan sikap dan perilaku tenaga kesehatan dalam memberikan layanan KB.
 - h) Peningkatan konseling dan edukasi kepada pengguna layanan KB.
2. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi tentang Program Keluarga Berkualitas:
 - a) Peningkatan Kesadaran:
 - b) Kampanye dan sosialisasi program Keluarga Berkualitas melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan penyuluhan.
 - c) Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuka adat dalam promosi program Keluarga Berkualitas.
 - d) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk promosi program Keluarga Berkualitas.
 - e) Peningkatan Edukasi:
 - f) Penyediaan informasi yang lengkap dan jelas tentang program Keluarga Berkualitas.
 - g) Pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi remaja dan pemuda.
 - h) Pembinaan ketahanan keluarga.
3. Pergeseran Norma Sosial dan Budaya:

- a) Perubahan norma sosial dan budaya yang tidak mendukung program Keluarga Berkualitas:
- b) Edukasi dan komunikasi perubahan perilaku (KPP) untuk mengubah norma dan budaya yang tidak mendukung program Keluarga Berkualitas.
- c) Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuka adat dalam advokasi dan kebijakan untuk mendukung program Keluarga Berkualitas:
- d) Seminar, lokakarya, dan pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuka adat untuk membahas tentang pentingnya program Keluarga Berkualitas.
- e) Pembuatan peraturan daerah yang mendukung program Keluarga Berkualitas:
- f) Mewajibkan pasangan usia subur (PUS) untuk mengikuti program KB.

4. Faktor Lain:

- a) Meningkatkan tingkat pendidikan dan ekonomi Masyarakat, dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih sedikit anak.
- b) Urbanisasi, biaya hidup di kota yang lebih tinggi dan akses yang lebih mudah terhadap layanan Keluarga Berkualitas.
- c) Peningkatan usia pernikahan: Perempuan memiliki lebih sedikit waktu untuk hamil dan melahirkan selama masa reproduksinya.

Faktor Penghambat Penurunan TFR di Kalimantan Tengah:

1. Faktor Sosial Budaya:

- Norma dan budaya patriarki:

Budaya patriarki yang masih kuat di Kalimantan Tengah, di mana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan anak-anak, dapat mendorong perempuan untuk memiliki lebih banyak anak.

- Ketersediaan tenaga kerja anak:

Di beberapa daerah pedesaan di Kalimantan Tengah, anak-anak masih dianggap sebagai tenaga kerja yang membantu orang tua mereka dalam pekerjaan pertanian atau perkebunan.

- Nilai dan kepercayaan tradisional:

Nilai dan kepercayaan tradisional yang menganggap bahwa banyak anak adalah berkah dan simbol kesuburan dapat menghambat upaya penurunan TFR.

2. Faktor Ekonomi:

- Kemiskinan:

Kemiskinan dapat mendorong perempuan untuk memiliki lebih banyak anak sebagai jaminan sosial di masa depan.

- Biaya hidup:

Biaya hidup yang tinggi di beberapa daerah di Kalimantan Tengah, terutama di kota-kota besar, dapat menjadi hambatan bagi keluarga untuk memiliki lebih banyak anak.

- Akses terhadap pendidikan dan pekerjaan:

Terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan dapat mendorong mereka untuk menikah dan memiliki anak di usia muda

3. Faktor Akses dan Kualitas Layanan KB:

- Akses terhadap layanan KB:

Di beberapa daerah terpencil di Kalimantan Tengah, akses terhadap layanan KB masih terbatas. Kualitas layanan KB: Kualitas layanan KB yang kurang memadai, seperti kurangnya informasi dan pilihan metode KB, dapat membuat perempuan enggan untuk menggunakan KB.

- Kesadaran dan edukasi tentang program KB:

Kurangnya informasi dan edukasi tentang program KB, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, dapat menjadi hambatan bagi penurunan TFR.

4. Faktor Lain:

- Ketersediaan dan akses terhadap informasi:

Ketersediaan dan akses terhadap informasi yang akurat tentang kesehatan reproduksi dan seksual masih terbatas di beberapa daerah di Kalimantan Tengah.

- Keterlibatan laki-laki dalam program KB:

Kurangnya keterlibatan laki-laki dalam program KB dapat menjadi hambatan bagi penurunan TFR.

Dapat disimpulkan bahwa Capaian TFR di Kalimantan Tengah menunjukkan kemajuan pada tahun 2025, namun masih belum mencapai target nasional. Penurunan TFR di Kalimantan Tengah Tahun 2025 dihambat oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial budaya, ekonomi, akses dan kualitas layanan KB, dan faktor lain seperti ketersediaan dan akses terhadap informasi dan keterlibatan laki-laki dalam program KB. Capaian TFR 2.26 di Kalimantan Tengah Tahun 2026 menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Tengah. Diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari semua pihak untuk menurunkan TFR di Kalimantan Tengah.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.10. Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	BB	A	112,5

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 5 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP.

Capaian Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP pada tahun 2025 ditargetkan sebesar BB dan realisasinya sebesar A, tingkat capaian sebesar 112,5 %. . Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh 5 komponen, yaitu :

- 1. Perencanaan Kinerja
- 2. Pengukuran Kinerja
- 3. Pelaporan Kinerja
- 4. Evaluasi Kinerja
- 5. Pencapaian Kinerja

Tabel 3.11. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	A	112,5	14.474.319.602,17	13.657.900.115,00	94,36

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perbandingan antara rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 94,36%, menunjukkan adanya efisiensi

anggaran sebesar 5,64 %. Dengan Kerjasama Tim semua ASN DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian komitmen bersama .

Output/hasil dari capaian program100 % dimana kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sudah sesuai dari perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 100% pada tahun 2025.

Dampak/Outcome dalam keberhasilan adalah tercapainya tujuan dan hasil dari Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyiapkan Sumber Daya yang Unggul dan Berkualitas di Kalimantan Tengah BERKAH dimulai dari Perlindungan Perempuan, Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak serta Keluarga Berkualitas.

3.2. REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA

Realisasi keuangan secara umum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran DP3APPKB Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu perubahan	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
	01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	2.08 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.221.608.490,17	13.412.037.530,00	94,31	14.221.608.490	100,00
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.393.260.654,16	10.618.729.773	93,20	11.393.260.654	100,00
	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	291.871.531,66	291.586.400	99,90	291.871.532	100,00
	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.153.700,00	22.149.900	99,98	22.153.700	100,00
	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.000.000,00	19.967.400	99,84	20.000.000	100,00
	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.135.246,67	21.027.400	99,49	21.135.247	100,00
	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	228.582.584,99	228.441.700,00	99,94	228.582.585	100,00
	2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.418.690.394,55	7.722.736.832	91,73	8.418.690.395	100,00
	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.377.664.129,55	7.681.846.582	91,69	8.377.664.130	100,00
	2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.161.500,00	5.160.450	99,98	5.161.500	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu perubahan	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	35.864.765,00	35.729.800	99,62	35.864.765	100,00
	2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.488.400,00	43.461.838	99,94	43.488.400	100,00
	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	43.488.400,00	43.461.838	99,94	43.488.400	100,00
	2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.000.000	93,33	15.000.000	100,00
	2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	14.000.000	93,33	15.000.000	100,00
	2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	866.413.555,95	849.903.833	98,09	866.413.556	100,00
	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.818.000,00	37.815.000	99,99	37.818.000	100,00
	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.221.827,00	156.210.100	99,99	156.221.827	100,00
	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.835.500,00	62.833.550	100,00	62.835.500	100,00
	2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	72.789.818,00	72.777.700	99,98	72.789.818	100,00
	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.923.810,95	381.442.883	95,86	397.923.811	100,00
	2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	138.824.600,00	138.824.600,00	100,00	138.824.600	100,00
	2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.800.000,00	23.800.000	100,00	23.800.000	100,00
	2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	23.800.000,00	23.800.000	100,00	23.800.000	100,00
	2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.314.763.290,00	1.256.077.958	95,54	1.314.763.290	100,00
	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.248.700,00	11.248.400	100,00	11.248.700	100,00
	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.214.985,00	178.576.858	92,90	192.214.985	100,00
	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.111.299.605,00	1.066.252.700	95,95	1.111.299.605	100,00
	2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.233.482,00	417.162.912	99,51	419.233.482	100,00
	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.346.400,00	159.277.912	98,72	161.346.400	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu perubahan	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.735.200,00	50.735.000	100,00	50.735.200	100,00
	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	207.151.882,00	207.150.000	100,00	207.151.882	100,00
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.482.618.739,02	1.475.184.180	99,50	1.482.618.739	100,00
	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	144.090.381,02	142.253.700	98,73	144.090.381	100,00
	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	38.145.621,00	37.019.050	97,05	38.145.621	100,00
	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	88.495.000,00	88.397.100	99,89	88.495.000	100,00
	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	17.449.760,02	16.837.550	96,49	17.449.760	100,00
	2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	1.324.234.998,00	1.318.648.630	99,58	1.324.234.998	100,00
	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1.258.014.000,00	1.253.724.380	99,66	1.258.014.000	100,00
	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	66.220.998,00	64.924.250	98,04	66.220.998	100,00
	2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	14.293.360,00	14.281.850	99,92	14.293.360	100,00
	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	14.293.360,00	14.281.850	99,92	14.293.360	100,00
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	423.026.583,00	411.179.911	97,20	423.026.583	100,00
	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	54.813.533,00	54.223.600	98,92	54.813.533	100,00
	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan	8.994.038,00	8.960.000	99,62	8.994.038	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu perubahan	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
	Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi					
	2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	45.819.495,00	45.263.600	98,79	45.819.495	100,00
	2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	247.668.000,00	240.063.811	96,93	247.668.000	100,00
	2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	86.000.000,00	78.408.411	91,17	86.000.000	100,00
	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	161.668.000,00	161.655.400	99,99	161.668.000	100,00
	2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	120.545.050,00	116.892.500	96,97	120.545.050	100,00
	2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	101.029.000,00	101.027.800	100,00	101.029.000	100,00
	2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	19.516.050,00	15.864.700	81,29	19.516.050	100,00
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	5.634.904,00	5.570.000,00	98,85	5.634.904,00	100,00
	2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	5.634.904,00	5.570.000,00	98,85	5.634.904,00	100,00
	2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	5.634.904,00	5.570.000	98,85	5.634.904	100,00
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	60.889.611,00	56.610.350	92,97	60.889.611	100,00
	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam	60.889.611,00	56.610.350	92,97	60.889.611	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu perubahan	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
	Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					
	2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	14.584.518,00	12.416.350	85,13	14.584.518	100,00
	2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	46.305.093,00	44.194.000	95,44	46.305.093	100,00
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	158.603.428,00	155.601.516	98,11	158.603.428	100,00
	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	85.937.361,00	85.197.716	99,14	85.937.361	100,00
	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	25.742.995,00	25.557.250	99,28	25.742.995	100,00
	2.08.06.1.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	60.194.366,00	59.640.466	99,08	60.194.366	100,00
	2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	72.666.067,00	70.403.800	96,89	72.666.067	100,00
	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	68.818.858,00	67.118.800	97,53	68.818.858	100,00
	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	3.847.209,00	3.285.000	85,39	3.847.209	100,00
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	697.574.570,99	689.161.800	98,79	697.574.571	100,00
	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	255.084.070,99	253.426.000	99,35	255.084.071	100,00
	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	112.126.000,00	112.116.000	99,99	112.126.000	100,00
	2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	142.958.070,99	141.310.000	98,85	142.958.071	100,00
	2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang	442.490.500,00	435.735.800	98,47	442.490.500	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu perubahan	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
	Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					
	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	73.038.500,00	72.720.900	99,57	73.038.500	100,00
	2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	369.452.000,00	363.014.900	98,26	369.452.000	100,00
2	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	<u>252.711.112,00</u>	<u>245.862.585,00</u>	97,29	<u>252.711.112</u>	100,00
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	9.002.869,00	8.935.850	99,26	9.002.869	100,00
	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	9.002.869,00	8.935.850	99,26	9.002.869	100,00
	2.14.02.1.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	9.002.869,00	8.935.850	99,26	9.002.869	100,00
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	208.474.335,00	201.805.335	96,80	208.474.335	100,00
	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	200.000.000,00	193.331.000	-	200.000.000	-
	2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi kerja sama dengan stakeholder dan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi, promosi dan KIE program Bangsa Kencana	200.000.000,00	193.331.000	-	200.000.000	-
	2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	8.474.335,00	8.474.335	100,00	8.474.335	100,00
	2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa Kencana	8.474.335,00	8.474.335	100,00	8.474.335	100,00
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	35.233.908,00	35.121.400	99,68	35.233.908	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu perubahan	Realisasi			
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	35.233.908,00	35.121.400	99,68	35.233.908	100,00
	2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	35.233.908,00	35.121.400	99,68	35.233.908	100,00
	GRAND TOTAL	14.474.319.602,17	13.657.900.115	94,36	14.474.319.602	100,00

Sumber Data: Keuangan Dinas P3APPKB Prov.Kalteng

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan tengah pada Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF), dengan Pagu sebesar Rp600.660.000 terealisasi sebesar Rp447.181.700,- atau 74,45% keuangan dan capaian fisik 95,15%.

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Renja Tahun 2025	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	%	100	100
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	%	100	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Renja Tahun 2025	Satuan	Target	Realisasi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah	Orang	35	35
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan	Orang	45	45
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan	Kab/Kota	12	14

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Renja Tahun 2025	Satuan	Target	Realisasi
		Kewenangan Provinsi	Perempuan dan Anak			
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Dokumen	13	10
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	1
2	Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan	%	90	100
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak	Dokumen	1	1
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	Dokumen	1	1
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Dokumen	1	1
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)	%	60	65

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Renja Tahun 2025	Satuan	Target	Realisasi
		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	Dokumen	1	1
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	Dokumen	1	1
3	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	Kab/Kota	14	14
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	%	50	50
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Dokumen	1	1
4	Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga	Program Pengendalian Penduduk (PP)	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	Indeks	2,28	2,24
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	1	1
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	%	5	8,1
		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi,	Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan	Dokumen	0	1

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Renja Tahun 2025	Satuan	Target	Realisasi
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal			
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen	1	1
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	%	62,7	62,72
		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga	Dokumen	1	1

Sumber Data: Perencanaan Dinas P3APPKB Prov.Kalteng

3.3 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI/REKOMENDASI

A. REKOMENDASI

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Membuat SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai per bagian/bidang serta mekanisme pengukuran kinerja berdasarkan cara perhitungan yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama. Mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kriteria sebagai berikut:
 - Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date*;
 - Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid;
 - Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan;
 - Terdapat penanggungjawab yang jelas;

- e) Jelas waktu *delivery*nya;
- 2. Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data
 - a. Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja seluruh pegawai serta dapat menjadi pertimbangan penempatan pegawai di bagian atau bidang. (bukti dokumen berupa rekapitulasi pembayaran tunjangan kinerja per bulan).
 - b. Penyajian seluruh informasi dalam laporan kinerja supaya menjadi perhatian seluruh pegawai (dibuktikan dengan hasil paparan draf laporan kinerja sebelum diformalkan, daftar hadir, undangan serta dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan).
 - c. Menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas sesuai dengan standar atau minimal memuat:
 - d. 1) Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, isu strategis, Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis, Ringkasan LHE 2) Capaian Kinerja Organisasi, realisasi anggaran, Tindak lanjut LHE. 3) Lampiran Form pendanaan Indikatif pada Renstra, Perjanjian Kinerja, dan rekapitulasi data Pada dokumen laporan kinerja supaya mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja meliputi
 - 1) Cara perhitungan realisasi indikator kinerja mengacu pada rumus/cara perhitungan yang telah diformalkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 2) Mencantumkan sumber data untuk setiap perhitungan yang dituangkan dalam dokumen laporan kinerja
 - e. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh APIP.
 - f. Mendokumentasikan segala aktivitas kinerja dengan baik (Surat tugas, notulen rapat, daftar hadir dan lain sebagainya).

B. TINDAK LANJUT

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan oleh DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dari hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DP3PPKB yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah :

1. SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai per bagian/bidang serta mekanisme pengukuran kinerja berdasarkan cara perhitungan yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama.

2. Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja seluruh pegawai serta dapat menjadi pertimbangan penempatan pegawai di bagian atau bidang.
3. Hasil paparan draf laporan kinerja sebelum diformalkan, daftar hadir, undangan serta dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan.
4. Dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas sesuai dengan standar atau minimal memuat:
 - a. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, isu strategik, Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis, Ringkasan LHE
 - b. Capaian Kinerja Organisasi, realisasi anggaran, Tindak lanjut LHE. 3) Lampiran Form pendanaan Indikatif pada Renstra, Perjanjian Kinerja, dan rekapitulasi data
5. informasi tentang pencapaian kinerja meliputi
 - a. Cara perhitungan realisasi indikator kinerja mengacu pada rumus/cara perhitungan yang telah diformalkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - b. Mencantumkan sumber data untuk setiap perhitungan yang dituangkan dalam dokumen laporan kinerja
6. Dokumentasi aktivitas kinerja dengan baik (Surat tugas, notulen rapat, daftar hadir dan lain sebagainya).

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pada Renstra Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan 6 (enam) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 memuat 5 (lima) sasaran selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 (enam) indikator kinerja.Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 6 (enam) sasaran dapat dicapai dengan hasil SANGAT BAIK. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

Sedangkan untuk kategori capaian digunakan sebagai berikut :

Rentang Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100%	Sangat Baik
75% sampai dengan 100%	Baik
55% sampai 75 %	Cukup
Kurang dari 55%	Kurang

Berdasarkan uraian capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan mendapat predikat nilai Sangat Baik, dengan rata-rata capaian sebesar 91,02%. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) Indikator Sasaran.

SASARAN 2 : Mengoptimalkan Kualitas Data pada DP3APPKB Provinsi Jumlah ketersediaan Data dengan capaian sebesar 71,42%. Pengompilasian data hanya bisa dilaksanakan ke 10 Kab/kota dari tarbet 14 kab/kota.

SASARAN 3 : Meningkatnya pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif predikat nilai Sangat Baik, dengan capaian sebesar 102, 87 %. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) Indikator Sasaran.

SASARAN 4 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap anak dengan kategori nilai Baik, dengan capaian sebesar 100 %. Hal ini terbukti dari hasil Pengukuran 1 (satu) indikator.

SASARAN 5 : Meningkatnya Kualitas Keluarga dengan kategori nilai Baik , dengan capaian lbangga sebesar 97,45%. Dan TFR 2,26 Hal ini terbukti dari hasil Pengukuran 2 (dua) indikator

SASARAN 6 : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan kategori nilai Sangat Baik, dengan capaian sebesar 112,5 %. Hal ini terbukti dari hasil Pengukuran 1 (Satu) indikator sasaran

4.2. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Langkah-langkah optimalisasi pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan strategi kebijakan sebagai berikut :

1. Kabupaten/ Kota dapat dapat merencanakan kegiatan yang selaras dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Dengan Arah kegiatan DP3APPKB ke Promosi,Pemenuhan dan Perlindungan.
2. Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) diKabupaten/Kota.
3. Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan (Industri Rumahan) Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dengan Hapakat Membangun Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Menargetkan nilai minimal Pratama di seluruh Kabupaten/Kota untuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pencapaian PROVINSI LAYAK ANAK.
5. Mendukung capaian Prioritas Nasional untuk Pencegahan STUNTING dan Perkawinan Usia Anak (PUA) di Kalimantan Tengah dengan Pendekatan Keluarga, Tokoh Agama,Tokoh Adat dan Perguruan Tinggi di Kalimantan Tengah.
6. Membangun Komitmen dalam percepatan penurunan Stunting dan Perkawinan Usia Anak (PUA) di Kalimantan Tengah dengan pendekatan Keluarga berisiko Stunting.
7. Advokasi dan pendampingan ke Kabupaten/Kota untuk membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat (PATBM).
8. Memberikan Pemahaman dalam bidang Politik, Sosial dan budaya kepada Organisasi dan Forum Perempuan yang ada di Kalimantan Tengah .
9. Melakukan advokasi/pendampingan kepada UPTD-PPA Kab/Kota dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM pengelola UPTD-

PPA dalam rangka layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,
Tersosialisasi UU TPPKS No 12 tahun 2025

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 yang dapat kami sajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan yang sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN -LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

alan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M. Kes**

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom**

Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2026

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196807171999032006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)**TAHUN 2026**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN
1	Nilai Sakip	Angka	80,35
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	89,15
3	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	4
4	Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	indeks	18,4
5	Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak	dokumen	14
6	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	persen	78,57
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,55
8	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	90
9	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	90
10	Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	Indeks	3,48
11	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	angka	2,23
12	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	angka	38,2
13	Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	indeks	57,9
14	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	angka	66,41
15	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	angka	21
16	Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	persen	88,81
17	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	persen	8,44

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

18	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8
19	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	62,7
20	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	62,64
21	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	86,88
22	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	26,35

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196807171999032006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

iii. REKAPITULASI DATA

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**

Sasaran	Indikator	Realisasi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	82,41	82,41	82,08	81,98	100,7	91,02
Meningkatnya pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	108,36	114,28	111,57	102,87

Sasaran	Indikator	Realisasi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	100	84,62	50	52	94,55	100
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	-	-	54,01	54,25	86,88	97,45
	Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)						99,11
7. Meningkatnya	Nilai Evaluasi	BB	BB	BB	A	A	A

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		89,07	89,07	89,09	89,11	89,13	89,15
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,90	81,90	81,92	81,94	81,96	81,98
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD		3,43 %	3,50 %	3,60 %	3,70 %	4,00 %
2	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan									
		Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan	85 %	85 %	87,5 %	90 %	92,5 %	95 %

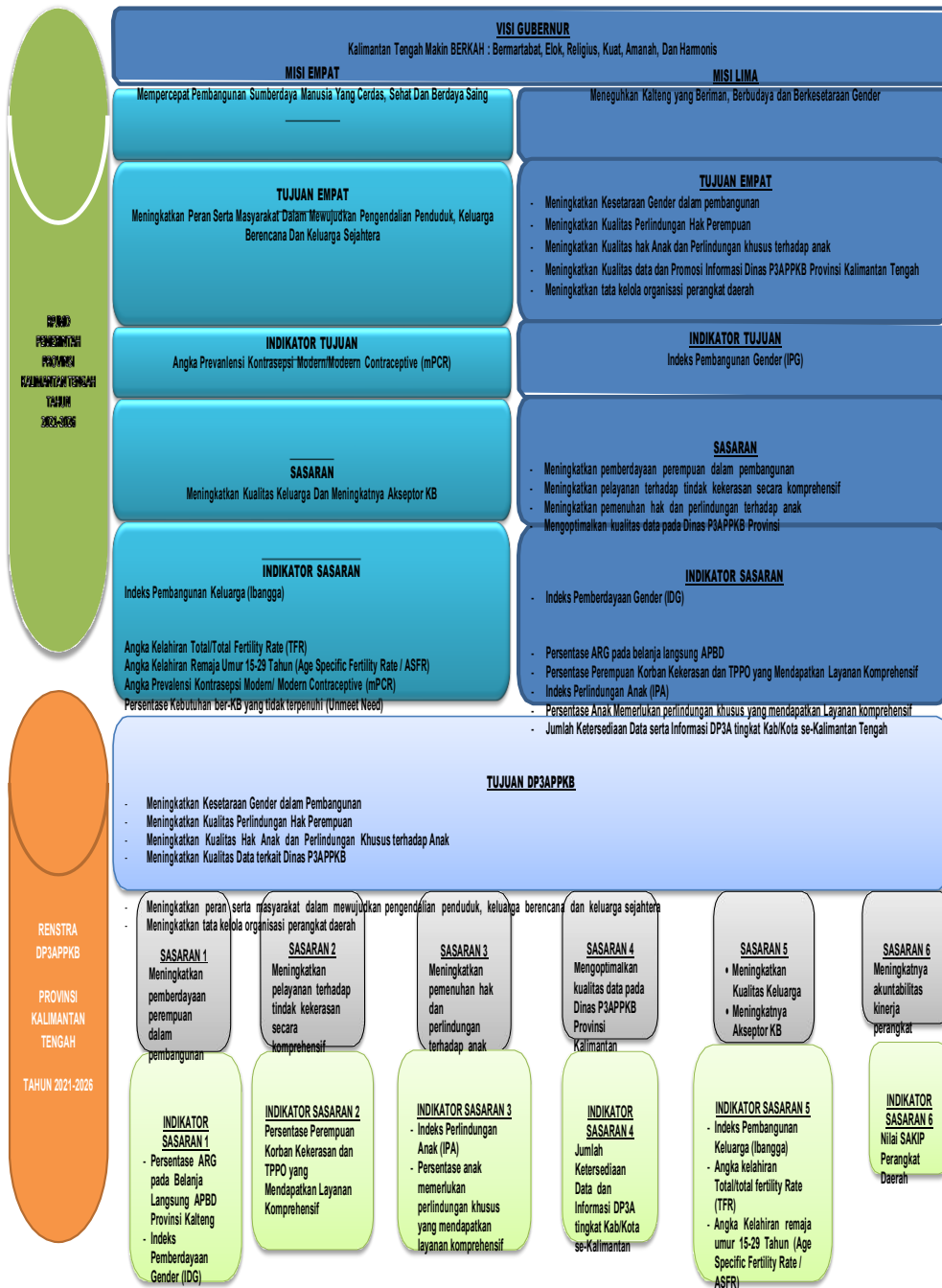
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran		Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Layanan Komprehensif							
3	Meningkatkan Kualitas hak Anak dan Perlindungan khusus terhadap anak										
		Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,83	61,83	63,68	65,59	67,55	69,57	
				Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	50 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	

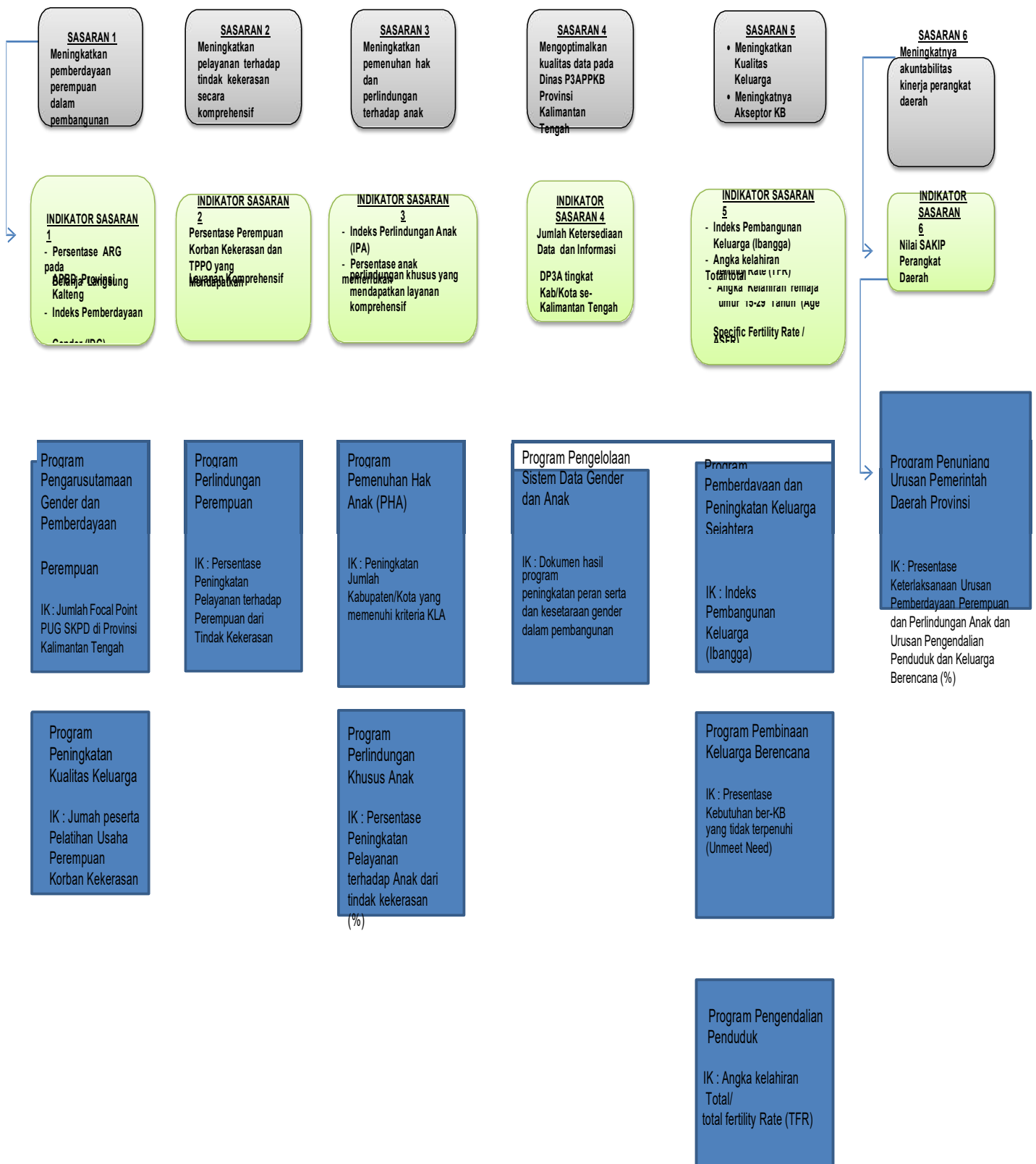
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatkan Kualitas data terkait Dinas P3APKB									
		Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah		Jumlah Ketersediaan Data serta Informasi DP3A tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	8 Kab/Kota	10 Kab/Kota	12 Kab/Kota	14 Kab/Kota
5	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)		73,23	73,23	73,68	74,26	74,26	74,26

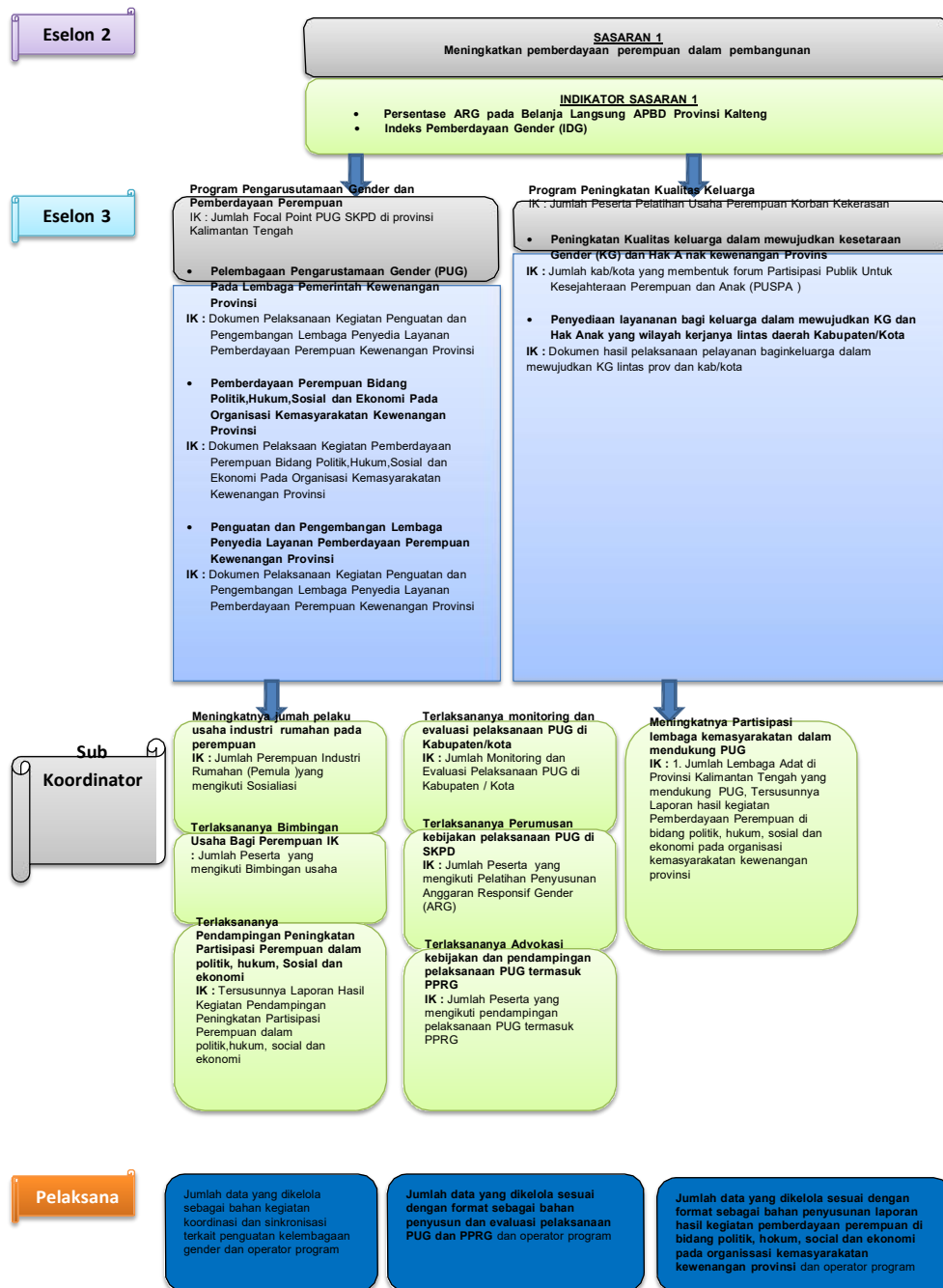
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan kualitas keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	60,32	62,44	64,55	64,55	64,55
				Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,10	2,10	2,06	2,00	1,96	1,96
				Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	21	21	20	18	16	16
		Meningkatnya akseptor KB		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern	73,23	73,23	73,68	74,26	74,26	74,26

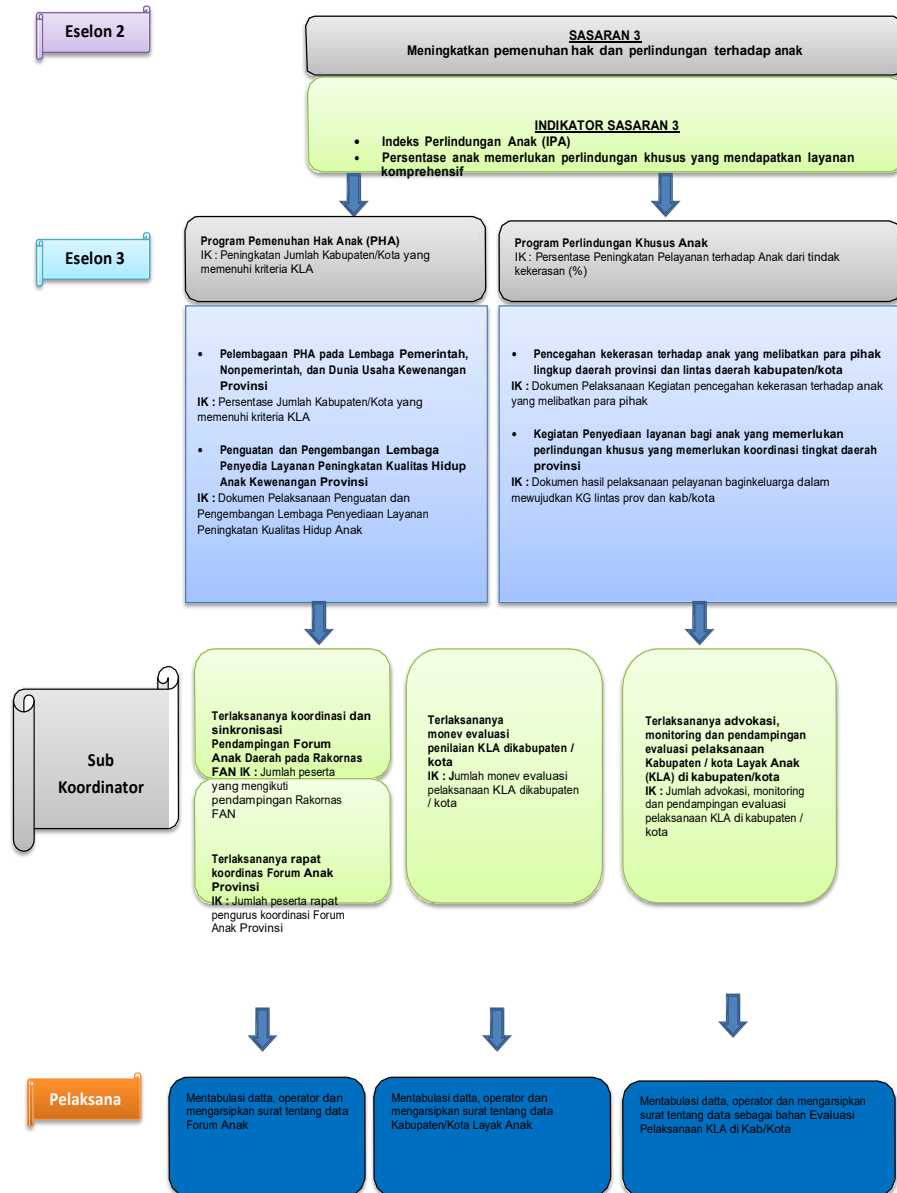
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran		Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Contraceptive (mPCR)						
				Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5,36 %	5,36 %	5,18 %	5 %	5,01 %	5,01 %
6	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat		70	70	74	77	80	85
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB

IV. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD 2021 – 2026)

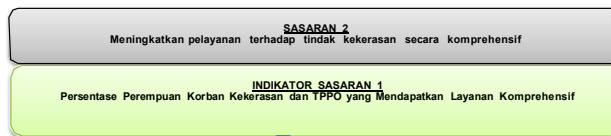




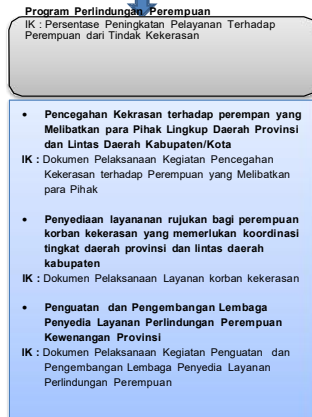




Eselon 2



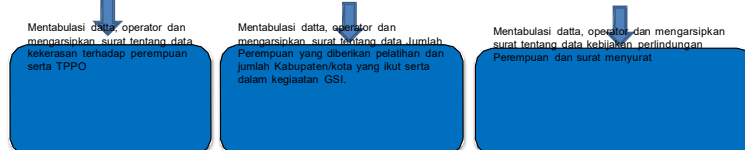
Eselon 3



Sub Koordinator



Pelaksana

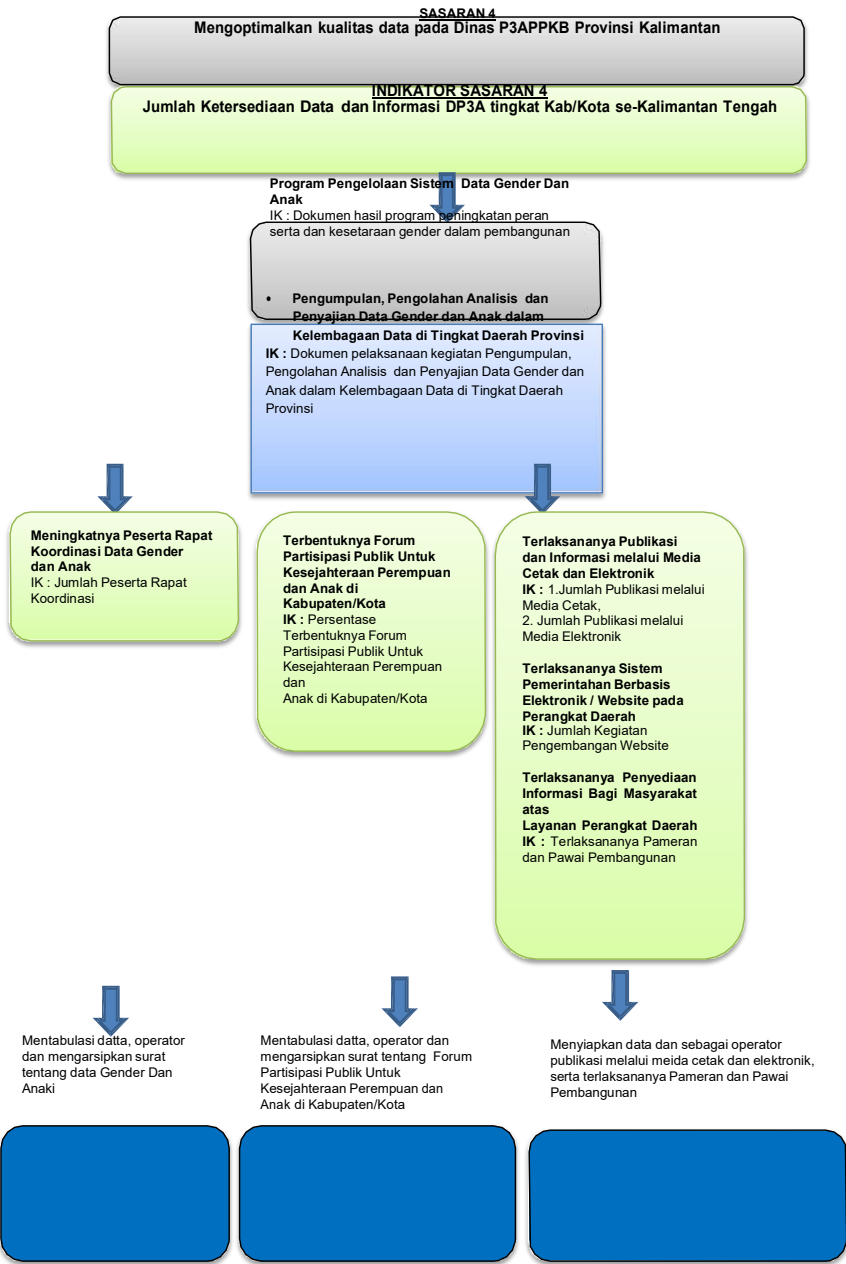


Eselon 2

Eselon 3

Sub Koordinator

Pelaksana





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 3222359
Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
(LHE)**

**ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

**NOMOR : 700.1.2.1/ 062 /LHE/2025/INSP
TANGGAL : 22 APRIL 2025**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon/Faksimile (0536) 3222359

Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
(LHE)**

PADA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 700.1.2.1/062/LHE/2025/INSP

TANGGAL : 22 APRIL 2025

TERHADAP : AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

MASA EVALUASI : KINERJA TAHUN 2024

A. Pendahuluan

1. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah.

Diperiksa oleh :	PPJ	DALNIS	KT	AT
Paraf				

- h. Surat Tugas dari Plt. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 700/14/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 26 Maret 2025 tentang Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Perangkat Daerah

2. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil maka perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dokumen yang dievaluasi yaitu, Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 serta dokumen terkait lainnya.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- a. *Checklist* Pengumpulan Data;
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
- c. Observasi;

Diperiksa oleh :	PPJ	DALNIS	KT	AT
Paraf				

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Sebagai salah satu unit organisasi perangkat kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- g. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
- h. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;

Diperiksa oleh :	PPJ	DALNIS	KT	AT
Paraf	<i>h</i>	<i>yt</i>	<i>z</i>	<i>re</i>

- i. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- j. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
- k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

- a. Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian tahun 2024
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,96	79,99	98
Meningkatnya pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100	102,11 %
Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	90%	90%	100
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	64,55 %	62,55%	96,90
	Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,25	2,28	98,68 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	BB	A	112,5

Diperiksa oleh :	PPJ	DALNIS	KT	AT
Paraf				

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi pada tahun 2024 direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sesuai kewenangannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a. Membuat SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja per bagian/bidang serta mekanisme pengukuran kinerja berdasarkan cara perhitungan yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama.
- b. Membuat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data dalam pengukuran kinerja.
- c. Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja aparatur serta dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional.
- d. Penyajian seluruh informasi dalam laporan kinerja supaya menjadi perhatian seluruh pegawai (dibuktikan dengan hasil paparan draf laporan kinerja sebelum diformalkan, daftar hadir, undangan serta dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan).
- e. Pada dokumen laporan kinerja supaya mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja meliputi
 - 1) Cara perhitungan realisasi indikator kinerja mengacu pada rumus/cara perhitungan yang telah diformalkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 2) Mencantumkan sumber data untuk setiap perhitungan yang dituangkan dalam dokumen laporan kinerja
- f. Mendokumentasikan segala aktivitas kinerja dengan baik (Surat tugas, notulen rapat, daftar hadir dan lain sebagainya).

Atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti adalah :

- a. Membuat SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja per bagian/bidang serta mekanisme pengukuran kinerja berdasarkan cara perhitungan yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama.
- b. Membuat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data dalam pengukuran kinerja.
- c. Penyajian seluruh informasi dalam laporan kinerja supaya menjadi perhatian seluruh pegawai (dibuktikan dengan hasil paparan draf laporan kinerja sebelum diformalkan,

Diperiksa oleh :	PPJ	DALNIS	KT	AT
Paraf				

B. Gambaran Hasil Evaluasi

1. Dari hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh **nilai sebesar 80,25 dengan kategori A** (Memuaskan, terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 4/pengawas/subkoordinator). Adapun secara rinci sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,50	26,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,90	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,70	12,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,15	19,15
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,25	80,25
			A	A

Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi 26,5 dari target idealnya 30,00, terdiri dari :

- 1) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia, hasil evaluasi 6,00 dari target idealnya 6,00.
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), hasil evaluasi 7,7 dari target idealnya 9,00
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hasil evaluasi 12,80 dari target idealnya 15,00

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi 22,50 dari target idealnya 30,00, terdiri dari :

- 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan, hasil evaluasi 4,00 dari target idealnya 6,00.

Diperiksa oleh :	PPJ	DALNIS	KT	AT
Paraf				

- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, hasil evaluasi 7,9 dari target idealnya 9,00.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun belum menjadi dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja serta dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional. hasil evaluasi 10,6 dari target idealnya 15,00.

Hal ini disebabkan :

- 1) Perangkat daerah belum membuat SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja per bagian/bidang serta mekanisme pengukuran kinerja berdasarkan cara perhitungan yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama.
- 2) Perangkat daerah belum membuat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data dalam pengukuran kinerja.
- 3) Pengukuran kinerja belum dijadikan sebagai dasar dalam penempatan /penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi 12,10 dari target idealnya 15,00, terdiri dari :

- 1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, hasil evaluasi 3,00 dari target idealnya 3,00.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, hasil evaluasi 3,20 dari target idealnya 4,50.
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, hasil evaluasi 5,90 dari target idealnya 7,50.

Hal ini disebabkan:

- 1) Penyajian seluruh informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian **seluruh pegawai** (dibuktikan dengan hasil paparan draf laporan kinerja sebelum diformalkan, daftar hadir, undangan serta dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan

Diperiksa oleh :	PPD	DALNIS	KT	AT
Paraf	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- 2) Dokumen laporan kinerja belum disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, yaitu :
 - a) Kesalahan penyajian Tindak lanjut LHE (TL yang disajikan adalah TL tahun sebelumnya/2022
 - b) Kesalahan penyajian lampiran Dokumen Perjanjian Kinerja (yang di sajikan adalah Perjanjian Kinerja Tahun sebelumnya /Tahun 2023)

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi 19,15 dari target idealnya 25,00, terdiri dari :

- 1) Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan, hasil evaluasi 4,00 dari target idealnya 5,00.
- 2) Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, hasil evaluasi 6,4 dari target evaluasi 7,50.
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja, hasil evaluasi 8,75 dari target idealnya 12,50.

Hal ini disebabkan karena rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

2. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan:

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

- a. Membuat SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai per bagian/bidang serta mekanisme pengukuran kinerja berdasarkan cara perhitungan yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama.

Mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kriteria sebagai berikut :

- Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date;
- Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid;
- Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan;
- Terdapat penanggungjawab yang jelas;
- Jelas waktu deliverynya;
- Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data

Diperiksa oleh :	PPJ	DALNIS	KT	AT
Paraf				

- b. Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja seluruh pegawai serta dapat menjadi pertimbangan penempatan pegawai di bagian atau bidang. (bukti dokumen berupa rekapitulasi pembayaran tunjangan kinerja per bulan).
- c. Penyajian seluruh informasi dalam laporan kinerja supaya menjadi perhatian seluruh pegawai (dibuktikan dengan hasil paparan draf laporan kinerja sebelum diformalkan, daftar hadir, undangan serta dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan).
- d. Menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas sesuai dengan standar atau minimal memuat:
 - 1) Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, isu strategis, Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis, Ringkasan LHE
 - 2) Capaian Kinerja Organisasi, realisasi anggaran, Tindak lanjut LHE.
 - 3) Lampiran Form pendanaan Indikatif pada Renstra, Perjanjian Kinerja, dan rekapitulasi data
- e. Pada dokumen laporan kinerja supaya mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja meliputi
 - 1) Cara perhitungan realisasi indikator kinerja mengacu pada rumus/cara perhitungan yang telah diformalkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 2) Mencantumkan sumber data untuk setiap perhitungan yang dituangkan dalam dokumen laporan kinerja
- f. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh APIP.
- g. Mendokumentasikan segala aktivitas kinerja dengan baik (Surat tugas, notulen rapat, daftar hadir dan lain sebagainya).

C. Penutup

1. Simpulan

Secara keseluruhan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk dapat lebih ditingkatkan capaiannya di waktu yang akan datang.

2. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Kami menghargai upaya seluruh jajaran dalam melaksanakan implementasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengharapkan ada upaya-upaya perbaikan untuk dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Diperiksa oleh :	PPJ	DALNIS	KT	AT
Paraf				

Demikian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat kami sampaikan sebagai bahan perbaikan manajemen kinerja.

INSPEKTUR DAERAH,



SARING, SH, MH
Jaksa Utama Muda
NIP.19650510 198703 1 003

=====

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TAHUN 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,50	26,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,90	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,70	12,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,15	19,15
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,25	80,25
			A	A

No	Catatan
1	Perangkat daerah belum membuat SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja per bagian/bidang serta mekanisme pengukuran kinerja berdasarkan cara perhitungan yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama. sumber data saat ini dari metadata Direktorat Pelaporan dan Statistik Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
2	Perangkat daerah belum membuat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data dalam pengukuran kinerja
3	Pengukuran kinerja belum dijadikan sebagai dasar penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
4	Penyajian seluruh informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian seluruh pegawai (dibuktikan dengan hasil paparan draf laporan kinerja sebelum diformalkan, daftar hadir, undangan serta dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan)
5	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkualitas sesuai dengan standar (Kesalahan penyajian Tindak lanjut LHE, Kesalahan penyajian Dokumen Perjanjian Kinerja)
6	Rekomendasi atas hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh APIP belum semua ditindaklanjuti

No	Rekomendasi
1	Membuat SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai per bagian/bidang serta mekanisme pengukuran kinerja berdasarkan cara perhitungan yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama.
	Mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kriteria sbb : - Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date; - Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; - Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; - Terdapat penanggungjawab yang jelas; - Jelas waktu deliverynya; - Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data
2	Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja seluruh pegawai serta dapat menjadi pertimbangan penempatan pegawai di bagian atau bidang
3	Penyajian seluruh informasi dalam laporan kinerja supaya menjadi perhatian seluruh pegawai (dibuktikan dengan hasil paparan draf laporan kinerja sebelum diformalkan, daftar hadir, undangan serta dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan).
4	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
	Kriteria standart adalah menyajikan sebagai berikut : Bab I : Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, isu strategik, Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis, Ringkasan LHE Bab II : Capaian Kinerja Organisasi, realisasi anggaran, Tindak lanjut LHE. Penutup : Lampiran Form pendanaan Indikatif pada Renstra, Perjanjian Kinerja, dan rekapitulasi data
5	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi pada LHE APIP
6	Mendokumentasikan segala aktivitas kinerja dengan baik (Surat tugas, notulen rapat, daftar hadir dan lain sebagainya).

48

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Setor		Daftar Evidence	Keterangan
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		26,1		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00		6		
Kriteria:						
1	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra)		Ya	2	Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah,	ada, dan telah diformalkan
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RKT)		Ya	2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	ada
3	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.		Ya	1	Rencana Aksi yang merjabarkan lebih lanjut target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK)	ada
4	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.		Ya	1	Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	ada (RKA, DPA, DPPA)
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00		7,7		
Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		Ya	1	Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja	telah tersusun dengan ditanda tangani pejabat berwenang dan di upload
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		Ya	1	https://da.kaleng.go.id/ Berlang dan monev.go.id	adilabel pada Web ID
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		BB	0,8	https://da.kaleng.go.id/	Renstra menyajikan bu strategi
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tupuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		BB	0,8	https://da.kaleng.go.id/	telah dituangkan dalam IKU
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		BB	0,8	https://da.kaleng.go.id/	indikator sebagian besar SMART
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		BB	0,8	https://da.kaleng.go.id/	IKU berkelanjutan
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.		BB	0,8	https://da.kaleng.go.id/ Berlang dan monev.go.id	kriteria dapat dicapai, menantang dan realistis
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).		BB	0,4	https://da.kaleng.go.id/	disajikan dim LKP
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).		BB	0,4	https://da.kaleng.go.id/	disajikan dim LKP
10	Setiap unit/satuan kerja menumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		A	0,45	https://da.kaleng.go.id/	PK Eselon 2
11	Setiap pegawai menumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		A	0,45	https://da.kaleng.go.id/	bukti dukung PK Pejabat Eselon 3 dan SKP (Pegawai/Fungsional)
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00		12,8		
Kriteria:						
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.		BB	1,6	https://da.kaleng.go.id/	DPA/BKA
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.		BB	1,6	https://da.kaleng.go.id/	Pohon Kinerja, PK dan SKP, Rencana Aksi
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.		BB	1,6		target tahunan pd renstra dan renja tercapai dan lap monev triwulan
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		BB	1,6		Lap triwulan, Undangan rapat, notulen rapat
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.		Ya	2		Renja-perubahan dan PK Perubahan
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		Ya	2		Renja-perubahan dan PK Perubahan
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		BB	1,6		Renja yang telah diformalkan dan PK eselon 2 yang telah diformalkan
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		BB	0,8		SKP seluruh pegawai
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		22,5		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00		4		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.		Ya	2	SOP Pengumpulan data per bidang	sumber data dari metadata Direktorat Pelaporan dan Statistik Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN 2024
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		C	1	cara perhitungan pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja lainnya	sda
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		C	1	Pengumpulan data per bidang	sda
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00		7,9		
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.		BB	1,2	https://da.kaleng.go.id/	lap per tw, Jadwal rapat rutin, SOP pengukuran kinerja, dokumentasi hasil pengukuran, TI
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		BB	1,2		
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.		BB	1,2		
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.		Ya	1,5		lap per triwulan
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.		BB	0,8		Lap Kinerja per org/per bdn paling lambat tgl 15 setiap bulan
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Ya	1	Aplikasi SPID, website OPD, kementerian, Ekin BKN	
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Ya	1	Aplikasi SPID, website OPD, Ekin BKN	
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00		10,4		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.		Ya	2	aplikasi sinerji.bkd.kaleng.go.id	Rekapitulasi pemberian tunjangan
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.		Tidak	0		bukan kewenangan PD

44

3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi		B	1,4		
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja		BB	1,6	lap per tw, jadwal rapat rutin, SOP pengukuran kinerja, dokumentasi hasil pengukuran, TL	
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja		BB	1,6	ada	
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja		BB	0,8	ada	
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja		BB	0,8	ada	
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja		BB	0,8	ada	
9	Setiap unit/setoran kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja		BB	0,8	ekinerja.bkn.go.id (pengisian SKP per bulan/tinjal 1 tahun)	SKP yang diajukan setiap bulan melalui aplikasi ekinerja
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja		BB	0,8	ekinerja.bkn.go.id (pengisian SKP per bulan/tinjal 1 tahun)	SKP yang diajukan setiap bulan melalui aplikasi ekinerja
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		12,1		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00		3		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun		Ya	0,5	LKIP Tahun 2024 yang ditandatangani per tanggal 10 Februari 2024	Laporan Kinerja disusun setiap tahun Web PPID, web esr.menpan.go.id Web perangkat daerah, web esr.menpan.go.id (per tgl 18 Maret 2025, khusus penda dapat menyampaikan sampai dengan April 2025) 14-Feb-23
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala		Ya	0,5		
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan		Ya	0,5		
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi		Ya	0,5		
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan		Ya	0,5		
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Ya	0,5		
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4,50		3,2		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar		B	0,35		terdapat kesalahan perhitungan persentase capaian kinerja, terdapat kesalahan penyajian kesalahan penyajian Tindak lanjut LHE, kesalahan lampiran Perjanjian Kinerja
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	0,5	BB	0,4	LKIP	disajikan pada Bab 3 LKIP
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformkan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan		B	0,35	LKIP	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah		B	0,35	LKIP	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya		B	0,35	LKIP	
	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level daerah/nasional (Benchmark Kinerja)		B	0,35	LKIP	
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformkan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan		B	0,35	LKIP	disajikan pada Bab 3 LKIP
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformkan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja		B	0,35	LKIP	disajikan pada Bab 3 LKIP
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformkan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)		B	0,35	LKIP	disajikan pada Bab 3 LKIP
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50		5,9		
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)		Ya	1,5	LKIP 2024	
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai		C	0,5	Bukti Sosialisasi draft pelaporan kinerja sebelum diformalkan/ditandatangani oleh kepala perangkat daerah	terdapat kesalahan penyajian informasi tindak lanjut LHE yang disajikan pada laporan kinerja adalah kondisi tahun sebelumnya, sebagian pegawai berpartisipasi dalam penyajian informasi laporan kinerja (100%) sesuai dengan mandat kebijakan daerah
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja		B	0,7		
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja		BB	0,8		
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja		BB	0,8		
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya		BB	0,8		
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi		BB	0,8		
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		19,15		
4.a	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00		4		
1	Telah dilakukan evaluasi dalam rangka pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan		BB	1,6		ada
2	Telah dilaksanakan Evaluasi Internal terhadap seluruh program unit kerja/perangkat daerah		BB	1,6	notulen rapat, dokumentasi foto, daftar hadir, undangan rapat	
3	Hasil evaluasi pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program sudah dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan		BB	0,8		
4.b	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50		6,4		
1	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh Pejabat/SDM yang berkompeten		Ya	2		ada
2	Evaluasi dalam rangka pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan telah dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan pencapaian kinerja		BB	1,6		
3	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		BB	1,6	notulen rapat, dokumentasi foto, daftar hadir, undangan rapat	
4	Hasil evaluasi pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan		BB	1,2		
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50		8,75		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti		B	1,75	bukti tindak lanjut LHE tahun 2023	Rekomendasi APJP tahun sebelumnya sebagian besar telah di tindaklanjuti

88

2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja	8	1,75
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	8	1,75
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	8	1,75
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	8	1,75

pada Laporan Kinerja Tahun 2024 namun yang disajikan pada laporan kinerja adalah tindak lanjut atas LHK tahun 2022

yt



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUNAN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,96
2	Mengoptimalkan kualitas Data Perempuan dan Anak pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ketersediaan Data pada DP3APPKB tingkat kab/kota se Provinsi Kalimantan Tengah	Kab/kota	14
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,55
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	65
4	Meningkatnya Pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif	persen	100
5	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	persen	64,36
		Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TFR per WUS Usia 15-49 Tahun	2,24
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB

Palangka Raya, Maret 2025

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
dr. LINEAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196807171999032006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M. Kes**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom**
Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Maret 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196807171999032006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2025

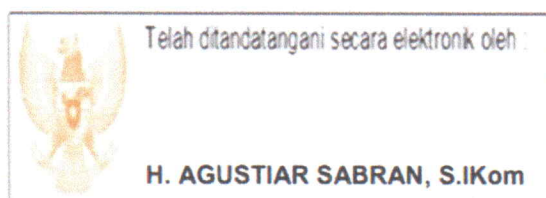
No.	Sasaran strategis	Indikator KinerjaUtama	Satuan	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	81,96
2.	Mengoptimalkan kualitas Data Perempuan dan Anak pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ketersediaan Data pada DP3APPKB tingkat kab/kota se Provinsi Kalimantan Tengah	Kab/kota	14
3.	Meningkatkan Pemenuhan hak dan Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,55
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	65
4.	Meningkatnya Pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100
5.	Meningkatkan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	persen	64,36
		Angka Kelahiran Total/Total Vertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/ TFR per WUS Usia 15-49 Tahun	2,24
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	BB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi	Rp12.188.952.098,34	
2.	Program Pengarusutamaan Gender Dan pemberdayaan Perempuan	Rp 764.830.381,02	
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp 376.780.533,00	
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 5.634.940,00	
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp 68.342.446,00	
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 113.971.046,00	
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 564.867.867,99	
8.	Program Pengendalian Penduduk	Rp 12.000.000,00	
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 218.813.277,00	
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	Rp 128.996.132,00	

Pihak Kedua,
 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
 KEPALA DINAS



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M. Kes**

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA .PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom**

Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

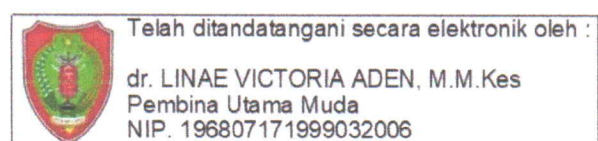
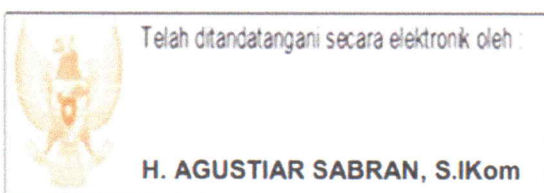
Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dibuat sebagaimana dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, Maret 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Tugas dan Fungsi : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Urusan Di
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber data
1.	Meningkatnya pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	$IDG = \frac{(I_{par} + I_{DM} + I_{lin-dist})}{3}$	DINAS P3APPKB Kabupaten/Kota, se-Kalimantan Tengah
2.	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Ketersediaan Data serta Informasi DP3APPKB Tingkat Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki system data serta informasi dibagi jumlah Kabupaten/Kota dikali 100	Dinas P3APPKB Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah
3.	Meningkatkan Pemenuhan hak dan Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	$\text{Nilai Kluster} = \frac{\text{Jumlah Nilai indikator klater}}{\text{Jumlah indikator}}$ $IPA = \frac{\sum (\text{Nilai Klaster} \times \text{Bobot})}{5}$	DINAS P3APPKB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah; Badan Pusat Statistik; SAKERNAS, SUSENAS; BAPPENAS

		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang mendapatkan Layanan Komprehensif	JKKLLK $PKKLLK = \frac{\text{---}}{JKK} \times 100\%$	DINAS P3APPKB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah; Simponi - PPA
4	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	JKKLLK $PKKLLK = \frac{\text{---}}{JKK} \times 100 \%$	Dinas P3APPKB Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah
5.	Meningkatkan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Formula Ibangga : $Ibangga = \frac{1}{3} (\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}) \times 100$	Dinas P3APPKB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
		Angka Kelahiran Total/Total Vertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \times \sum_{I=15-19}^{45-49} SFR$	Dinas P3APPKB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor Penilaian Kinerja Perangkat Daerah	Dinas P3APPKB se-Kalimantan Tengah, Inspektorat, Biro Organisasi, Setda Prov. Kalteng

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, Maret 2025
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196807171999032006



**DP3APPKB Kalteng Raih Peringkat 2 Informatif
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025
📍 Palangka Raya, 25 November 2025**

i. **PEROLEHAN PENGHARGAAN LPKRA**



